



2023

RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL KAB. KUTAI KARTANEGARA



Badan Kesbangpol
Kab. Kutai Kartanegara
Jl. Awang Sabran, Bc.Hk No. G3
Tenggarong Telp. 0541-661518
Fax 0541-661518 Kode Pos 75514



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Awang. Sabran Bc.Hk No.63 Telp.(0541) 661518, Fax.(0541) 662602
TENGGARONG 75514

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : SK-35/BKBP/SET-II/800/02/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026, perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu dibentuk tim penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023. Dengan susunan Personil Tim seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Sebagaimana Tersebut Pada Diktum Pertama adalah :
1. Menyiapkan bahan/data dari bidang guna mendukung kegiatan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 2. Menyiapkan dan merumuskan program renja;
 3. Mengadakan Rapat Tim untuk penyusunan Renja;
 4. Menyusun Laporan Hasil Rapat;
 5. Membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 6. Melaporkan hasil penyusunan Renja kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA – SKPD Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 14 Februari 2022

Kepala Badan,



RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
Nip. 19691226 200112 2 002

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : SK-35/BKBP/SET-IL/800/02/2022

Tanggal : 14 Februari 2022

Tentang : Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Badan	Pengarah	
2	Sekretaris	Penanggung Jawab	
3	Perencana Ahli Muda	Ketua	
4	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
5	Kabid. Ket. Ekososbud	Anggota	
6	Kabid. Idiologi dan Wasbang	Anggota	
7	Kabid. Politik Dalam Negeri	Anggota	
8	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda (Subkor Ketahanan Ekonomi)	Anggota	
9	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda (Subkor Ketahanan Sosbud)	Anggota	
10	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda (Subkor Idiologi dan Kewaspadaan)	Anggota	
11	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda (Subkor Pembauran)	Anggota	
12	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda (Subkor Fasilitasi Parpol dan Pemilu)	Anggota	
13	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda (Subkor Fasilitasi Ormas)	Anggota	
14	Darmadian Nur	Anggota	
15	Mugni	Anggota	
16	Zaini Ma'ruf	Anggota	
17	Juminah.HR	Anggota	
18	Yeni	Anggota	
19	Faridah	Anggota	

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 14 Februari 2022

Kepala Badan,



RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si

Nip. 19691226 200112 2 002



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja tahun 2023 menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan hingga sub kegiatan, dan merupakan alat pengukur keberhasilan setiap akhir periode pelaksanaan sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis yang diakhiri dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Selain itu, Rencana Kerja merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran, memberikan gambaran mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan yang disusun dilengkapi dengan indikator-indikator capaian kinerja yang dituangkan secara sistematis dengan alur yang jelas untuk menggambarkan cara pencapaian sasaran berupa *input*, *output*, dan *outcome* dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Rencana Kerja 2023 merupakan gambaran mendetail cara pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2023 untuk mewujudkan tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara. Komitmen ini hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan kinerja seluruh staf Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara yang optimal dan terorganisasi.



DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	71
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	72
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	84
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	87
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	88
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	88
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	91
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	95
4.1 Program dan Kegiatan	95
BAB V PENUTUP	105



PAKBAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan antara kota dan desa, antar sektor mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif daerah yang sangat prioritas dalam pembangunan dewasa ini.

Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari semua unsur tersebut, maka penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik perlu mengambil langkah-langkah guna membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menyiapkan strategi dan kebijakan.

Untuk itu diperlukan suatu perencanaan kerja berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas pada tahun 2023 yang akan datang, berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada pelaksanaan pembangunan tahun kedua RPJMD 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses mempersiapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam proses perencanaan kerja tahunan tentunya tidak terlepas dari rencana strategis yang telah dibuat sebagai acuan kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan dan pada tahun 2023 sebagaimana renstra yang ada akan lebih fokus kepada pemeliharaan situasi kondusif di dalam wilayah



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.

Sebagai langkah awal, diperlukan upaya penyempurnaan matriks struktur program dan kegiatan melalui penetapan indikator kinerja. Hasil dari penyusunan ini akan diimplementasikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yang mengambil tema pembangunan “**Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar, Konektivitas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah
2. Penataan manajemen keuangan dan aset daerah
3. Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu
4. Lingkungan Hidup Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan
5. Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif
6. Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak
7. Percepatan pembangunan desa sebagai basisproduksi pangan dan pemberdayaan masyarakat
8. Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan
9. Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
10. Pemulihan daya dukung lingkungan



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Tentang Ormas;



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024;
17. Peraturan Bersama Mendagri dan Menag No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;
29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023;



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

2. Meletakkan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara secara terkoordinasi, terpadu dan tepat waktu serta sasaran yang diinginkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan



Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Laludan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap visi dan misi Kepala Daerah, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sebagaimana disebutkan dalam Perubahan Renstra Badan Kesbangpol 2016-2021, pada tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Badan Kesbangpol bertugas menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Terkait dengan hal tersebut, selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021, Badan Kesbangpol telah melaksanakan berbagai program dukungan terhadap pembangunan daerah meliputi penanganan konflik, melakukan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan Pancasila, peningkatan partisipasi politik masyarakat, pengaturan database ormas dan parpol. Berikut tabel capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 :



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2021	% PENC.	KRITERIA PENILAIAN
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	85,00 Nilai	77,83	91,56%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Konflik dan Gejolak	30 kali	31 kali	96,67%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	100 %	92,90%	92,90%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	72 %	57,00%	79,17%	Tinggi
Rata-Rata				90,08%	Tinggi

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2021

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI 2021	% PENC.	KETERANGAN
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat	100 %	100%	100%	Data dasar Jumlah Konflik dan gejala masyarakat dan kejadian konflik pada tahun 2021 dapat diatasi, hal ini bisa diartikan bahwa keadaan situasi di Kutai Kartanegara kondusif
Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan	100%	94,20%	94,20%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparaturnya telah dilaksanakan hanya tingkat kehadiran peserta yang masih kurang karena pembatasan pandemi
Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	100%	92,25%	92,25%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparaturnya telah dilaksanakan hanya tingkat kehadiran peserta yang masih kurang karena pembatasan pandemi.
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik	100 %	100%	100%	kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

	Persentase Parpol Yang Tertib Administrasi	100%	93,75%	93,75%	Dari semua partai politik yang melengkapi berkas adm. Bantuan keuangan terdapat 1 parpol yang tidak melengkapi yaitu Partai Hanura
Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	100%	56,67%	56,67%	Dari target 30 ormas telah terpenuhinya 17 ormas yang telah tertib administrasi dalam perpanjangan dan pendaftaran serta pelaporan

Secara keseluruhan, Badan Kesbangpol cukup berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol tahun 2021, dengan perhitungan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja realisasinya memenuhi target sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja yang realisasinya mendekati target sasaran, dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya jauh dari target.

Capaian kinerja Badan Kesbangpol secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil memenuhi target kinerja yang dijanjikan pada awal tahun, capaian pada tahun 2021 dan lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021

Dalam hal pencapaian output program dan kegiatan tahun anggaran 2021 dengan rincian realisasi kinerja sebesar 94,87 % dan realisasi keuangan sebesar 84,25 %, untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini

Secara keseluruhan pencapaian renja dan renstra masih ada yang belum memenuhi target dikarenakan adanya penyesuaian capaian target program dan kegiatan hingga akhir tahun 2021, secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Dari review renja 2021, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat target kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap peraturan yang ada.



- b. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan sosialisasi/penyuluhan harus dibatasi jumlah pesertanya dan tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan
 - c. Adanya perubahan jadwal kegiatan
 - d. Masih kurangnya kesadaran para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat serta masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan, dimana kesemuanya merupakan sasaran utama sosialisasi, dengan harapan dari tokoh-tokoh ini bisa menyebarkan ke masyarakat tentang pesan/materi/aturan yang disampaikan.
 - e. Pelaksanaan Operasi Bersinar (Bersih Sindikat Narkoba) dari kepolisian yang menyebabkan meningkatnya jumlah kasus penyakit masyarakat khususnya kasus narkoba
 - f. Masih terdapat Ormas yang belum memahami peraturan perundang-undangan ormas
 - g. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 disebutkan bahwa ormas diperbolehkan untuk tidak terdaftar
 - h. Sikap apatis masyarakat untuk berpartisipasi memberikan hak pilihnya dalam Pemilukada Serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara, namun hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.
2. Terdapat target kinerja yang memenuhi target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :
- a. Terjalannya koordinasi yang baik antar instansi vertikal dengan lintas OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penanganan



- kejadian konflik dan gejolak masyarakat yang timbul dan tidak meluas.
- b. Forum-forum bentukan pemerintah seperti FKUB, FPK dan FKDM telah menjalankan fungsinya dengan baik di lingkungan masyarakat
 - c. Dengan gencarnya sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga bisa menggugah mereka untuk menyalurkan hak politiknya pada gelaran Pemilu
 - d. Adanya kepentingan politik yang tinggi yang turut membantu sebaran sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
 - e. Penyesuaian jadwal kegiatan terlaksana dengan baik
3. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka langkah yang telah diambil oleh OPD adalah :
- a. Membuat rencana prioritas terhadap program dan kegiatan yang dianggap sebagai pendukung utama capaian target kinerja
 - b. Pengaturan jadwal kegiatan sesuai dengan porsi anggaran yang tersedia
 - c. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan anggaran disesuaikan dengan kegiatan prioritas perangkat daerah
 - d. Menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan pada triwulan berikutnya



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Terhadap capaian program renstra, tentu saja hal ini sangat mempengaruhi karena banyak kegiatan pendukung capaian program tidak bisa dilaksanakan, dan hal ini akan disesuaikan pada tahun pelaksanaan Renstra berikutnya dengan adanya perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pada saat perubahan renstra telah selesai terdapat penyesuaian lagi terhadap Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang mengharuskan perubahan program dan kegiatan namun tidak merubah indikator kinerja yang ada

Dalam menghadapi capaian tersebut, tentunya terdapat permasalahan yang timbul di masyarakat yang harus diselesaikan dengan program dan kegiatan secara berkesinambungan dalam renstra kami yang dijabarkan ke dalam Renja

Dari penjabaran diatas, berikut kami sampaikan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan penyesuaian terhadap Renja tahun 2021 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terdapat penyesuaian anggaran dan target kinerja pada kegiatan yang terdapat pada program ini, penyesuaian dilakukan untuk melakukan pergeseran anggaran kepada kegiatan lain dalam rangka memenuhi target kinerja.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Pada program ini dilakukan penambahan pagu anggaran serta target kinerja dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran bagi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19.



3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Pagu kegiatan ini mengalami penambahan terkait dengan pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat dan upaya untuk mensinergikan langkah Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pada program ini dilakukan penambahan pagu anggaran serta target kinerja dalam rangka monitoring dan memberikan pemahaman terhadap organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Pada program ini dilakukan penambahan pagu anggaran serta target kinerja dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 serta kegiatan P4GN untuk BNK dalam pelaksanaan program Desa Bersih Narkoba (Desa BERSINAR)

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Seluruh Kegiatan pada program ini dilakukan pengurangan pagu anggaran serta target kinerja akibat penyesuaian dari dampak pandemi covid-19 terkait



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

penyuluhan kepada masyarakat dilakukan dengan jumlah peserta terbatas serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan Forkopimda

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol tahun 2021 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol tahun 2021 dengan realisasinya. Berikut capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2021 di setiap indikator kinerja :

Tujuan 1 :

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I sebagaimana diatas, diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Gambaran dan analisis pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2019	2020	2021
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	97,39%	97,77%	95,89%
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	88%	88%	88%	88%
Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan BMD	100%	100%	100%	100%
Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	100%
Tingkat Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100%	100%	100%	100%



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Dari 5 (lima) indikator tersebut diatas, terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target, dimana hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya terkait dengan pelaksanaan efisiensi kegiatan dan anggaran, berikut analisis dari 5 (lima) indikator tersebut :

a. Indikator 1 : Cakupan Pelayanan Administrasi Umum

Administrasi perkantoran merupakan salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan di bidang administrasi perkantoran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan mampu memberikan dampak kelancaran pada operasional suatu OPD dan memperlancar pekerjaan para aparatur di dalamnya. Secara keseluruhan pelayanan terhadap administrasi perkantoran sudah baik, namun dilihat dari capaian indikatornya tidak memenuhi target, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak selesai karena disesuaikan pada keadaan dan kebutuhan pelayanan administrasi pada saat itu, secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 item	20 item	100,00%
Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	42 unit	35 unit	83,33%
Penataan Arsip Perangkat Daerah	37 unit	35 unit	94,59%
Jasa Adm. Teknis Perkantoran	240 org/bln	240 org/bln	100%



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Selain dari uraian diatas, untuk uraian lain yang berhubungan dengan pelayanan administrasi perkantoran telah terlaksana dengan baik atau telah tercapai dari yang ditargetkan seperti ATK, Cetakan, makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi. Terkait tidak tercapainya target dari uraian diatas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor masih terdapat sisa perlengkapan yang tidak digunakan.
2. Dalam Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, terdapat 7 (tujuh) unit kendaraan yang BPKB masih dalam penelusuran.
3. Dalam Penataan Arsip Perangkat Daerah, terdapat 1 (satu) jenis barang yang tidak terealisasi.

Dengan adanya kendala tersebut maka capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2021 mengalami kenaikan, namun hal ini bukan menjadi faktor kegagalan karena belanja untuk kegiatan pelayanan administrasi perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan. Dan secara keseluruhan proses layanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik dan seluruh keperluan pada tahun 2021 telah terpenuhi. Dan pada tahun 2022 capaian akan ditingkatkan lagi sesuai dengan hasil evaluasi yang ada.

b. Indikator II : Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi

Baik

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara, cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang di pandang perlu untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik, adalah sebagai berikut :

1. Perlu membangun system/aplikasi berbasis komputer dalam pengelolaan database yang terintegrasi, yang dapat mengelola data parpol, ormas dan potensi konflik ipoleksosbud yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Kendaraan Operasional untuk pelaksanaan tugas ke wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
3. Sarana dan prasarana peralatan kerja banyak yang dalam keadaan rusak berat sehingga perlu diadakan penggantian
4. Sarana untuk penunjang penataan kearsipan belum memadai sehingga perlu dilengkapi
5. Adapun sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana SKPD

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi Barang
1	Kendaraan Roda Empat	6	2013	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	33	2013	Baik
3	Mesin Foto Copy	1	2013	Baik
4	Filling Kabinet	10	2012	Baik
5	Lemari Kaca	2	2013	Baik
6	Penghancur Kertas	2	2014	Baik
7	Papant Tulis	1	2013	Baik
8	AC	30	2014	Baik
9	Televisi	14	2013	Baik
10	Sound System	1	2013	Baik



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

11	Dispenser	8	2013	Baik
12	CCTV	4	2013	Baik
13	PC	20	2014	Baik
14	Printer	20	2014	Baik
15	UPS	10	2014	Baik

Sarana dan prasarana yang digunakan aparatur pada tahun 2021 tidak banyak mengalami perubahan karena pada tahun 2021 ini hanya dilaksanakan pengadaan perlengkapan gedung kantor dan untuk penataan kearsipan melalui pengadaan Air Conditioner (AC) dan Lemari Filling Kabinet dan kegiatan pemeliharaan namun tetap tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2021 ini yaitu 100% sama dengan capaian pada tahun 2020 yang lalu sehingga dalam hal sarana dan prasarana penunjang kerja/operasional para aparatur telah terlaksana dengan baik.

c. Indikator III : Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan BMD

Pengelolaan aset BMD dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaannya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain :



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

a. Mengupayakan ketepatan pelaporan BMD

Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolving sangat penting, karena cepat lambatnya pengajuan revolving sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian aset yang disampaikan ke Bagian Umum.

b. Ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Laporan BMD sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 Laporan BMD yang dibuat telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

1. 2 (dua) dokumen Laporan BMD Semesteran
2. 1 (satu) dokumen Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2020 sebesar 100%, dan di tahun 2021 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%

d. Indikator IV : Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Pengelolaan keuangan dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaannya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain :

a. Mengupayakan ketersediaan kecukupan dana (cash flow)

Pada awal tahun anggaran Badan Kesbangpol mendapat Uang Persediaan (UP) dari Bendahara umum Daerah sebesar Rp. 100.000.000,-. Untuk kesinambungan ketersediaan UP maka dibutuhkan kecepatan proses administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana dari UP hingga mencapai batas minimum 30% dari pagu UP untuk kemudian dilakukan revolving atau ganti uang persediaan. Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolving sangat penting, karena cepat lambatnya pengajuan revolving sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian anggaran yang disampaikan ke Bagian Keuangan.

b. Ketepatan penggunaan anggaran dan ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 Laporan Keuangan yang dibuat telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

- 12 (dua belas) dokumen Laporan Keuangan Bulanan
- 4 (empat) dokumen Laporan Keuangan Triwulan
- 2 (dua) dokumen Laporan Keuangan Semesteran
- 1 (satu) dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2019 sebesar 100%, dan di tahun 2020 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%



e. Indikator V : Tingkat Konsistensi RENSTRA dan RENJA

Dalam sebuah penyusunan dokumen perencanaan diperlukan konsistensi dalam penyusunan dokumen turunan dari perencanaan 5 tahunan ke perencanaan 1 tahun, sehingga akan mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja

Untuk menuju konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah ditempuh langkah konkrit sebagai berikut :

a. Penyelesaian Rencana Kerja dan Capaian Kinerja SKPD

Dokumen rencana kerja yang telah dibuat pada tahun 2021 dan juga untuk tahun 2022 telah selesai sebelum proses musrenbang sehingga aspirasi yang masuk telah ditampung dan direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan OPD yang menyentuh kepada masyarakat, demikian juga dengan pelaporan capaian kinerja untuk LKjIP pada tahun 2021 telah diselesaikan tepat waktu namun belum mendapat nilai karena belum dilakukan reuiu oleh Inspektorat, sedangkan laporan kinerja untuk setiap bulan kepada BAPPEDA Kutai Kartanegara telah dipenuhi melalui aplikasi E-Pantau.

Sampai dengan akhir tahun 2021 telah dibuat RENJA 2022, LKjIP 2020, LPPD 2020 dan laporan capaian kinerja bulanan tahun 2021 baik secara manual baik melalui aplikasi E – PANTAU dan telah dilaporkan 12 laporan capaian kinerja dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD selama tahun 2021 telah dilakukan monitoring oleh tim internal OPD agar mempermudah dalam



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

kontrol apakah telah sesuai dengan program dan target kinerja yang telah ditetapkan, setelah itu setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan bulan berikutnya akan dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi, terutama terkait dengan hasil dan dampak dari kegiatan tersebut terhadap kelompok sasaran kegiatan. Dengan demikian seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai hasil yang diharapkan kepada masyarakat khususnya. Dalam tahun 2021 terdapat 27 kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2020 sebesar 100%, dan di tahun 2021 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%

Tujuan 2 :

Meningkatnya Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis II sebagaimana diatas, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Cakupan Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2019	2020	2021
Cakupan Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat	100%	100%	100%	100%



Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, berikut analisis dari kedua indikator tersebut :

a. Indikator I: Cakupan Penanganan Konflik

Untuk capaian indikator pertama, cakupan penanganan konflik Badan Kesbangpol telah berupaya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya memang terjadi kenaikan jumlah demo dan terjadi kasus yang mengarah SARA namun secara keseluruhan telah dilakukan penanganan sebagaimana tabel dibawah ini :

a. Data Gangguan dan Konflik

Dengan berlanjutnya pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya dapat diatasi dengan baik hingga saat ini, membuat keadaan perkembangan ekonomi cenderung melambat sehingga mengakibatkan beberapa perusahaan harus mengadakan rasionalisasi jumlah karyawan sebagai langkah efisiensi operasional perusahaan. Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sedikit banyak menjadi beban sosial bagi daerah yang bisa berakibat meningkatnya angka kriminalitas ataupun penyakit masyarakat lainnya.

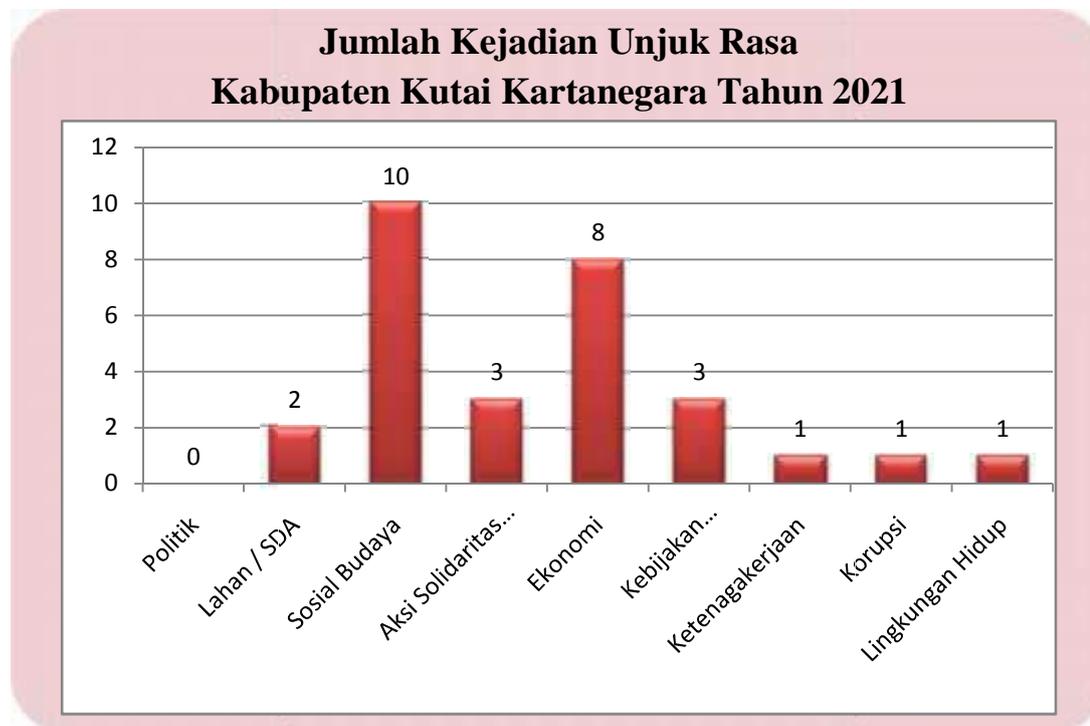
Secara umum kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2021 dalam kondisi yang sangat kondusif. Berdasarkan catatan bahan pengkajian permasalahan aktual daerah terdapat peningkatan jumlah aksi unjukrasa dibanding dengan tahun 2020.

Pada tahun 2020 terdapat aksi unjukrasa sebanyak 25 kali aksi, sedangkan pada tahun 2021 aksi unjukrasa sebanyak 29 kali aksi. Dengan permasalahan yang dominan adalah berlatar Sosial dan Budaya, kemudian masalah lahan masyarakat dengan perusahaan dan masalah kebijakan pemerintah dalam



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

kaitan penyediaan dan penyalanan masyarakat. Berikut disajikan data-data rekapitulasi kejadian selama tahun 2021.



**Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan latar belakang masalah)
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021**

No	Latar Belakang Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Politik													0
2	Lahan / SDA				1				1					2
3	Sosial Budaya					5	3				1		1	10
4	Aksi Solidaritas peristiwa Kemanusiaan nasional/ internasional					1	2							3
5	Ekonomi		1	3				1			2		1	8
6	Kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Publik		1	1									1	3
7	Ketenagakerjaan			1										1
8	Korupsi							1						1
9	Lingkungan Hidup				1									1
Jumlah Unjuk Rasa		0	2	5	2	6	5	2	1	0	3	5	3	29



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan kelompok aksi) di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021

No	Pelaku Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Mahasiswa (Organisasi & Kelompok Mahasiswa)					1	1						1	3
2	Gabungan Organisasi (Mahasiswa, Ormas, OKP, parpol dan Masyarakat)		1	2			1							4
3	Ormas / LSM			1				1			1		1	4
4	Elemen Masyarakat		1	2	2	4	3	1	1		2			16
5	Karyawan / Sarikat Pekerja					1							1	2
6	Organisasi Profesi													0
Jumlah Pelaku Unjuk Rasa		0	2	5	2	6	5	2	1	0	3	0	3	29

Berikut data kejadian sengketa hubungan industrial dan penanganan sengketa yang terjadi sepanjang tahun 2021.

Rekapitulasi Data Sengketa Hubungan Industrial di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021

No	Jenis Sengketa	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Sengketa Pengusaha dengan Perusahaan / Pemerintah													-
2	Sengketa Pekerja dan Pengusaha			2										2
3	Pemogokan Kerja													-
4	Penyelesaian Sengketa Buruh			2										2
5	Mediasi Sengketa Perusahaan dan Masyarakat					1								1
Jumlah Sengketa Hubungan Industrial		-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5



A. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta perlu peningkatan peran masyarakat untuk lebih aktif.

Permasalahan ini memerlukan suatu penanganan terpadu dan jalan keluar yang cepat, tepat dan terukur. Guna mendukung hal tersebut, dibutuhkan penyediaan data dan informasi aktual serta akurat. Sehingga diperlukan langkah-langkah kegiatan yang sinergis.

Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari pemerintah daerah yang sebagai leading sektor dalam koordinasi dalam menjaga keamanan di daerah. Hal ini dengan dibentuknya wadah/forum yang dapat mensinergikan seluruh kebijakan strategis berkenaan menjaga keamanan di daerah yaitu dengan dibentuknya:

1. Nama Forum : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Dasar Hukum :
 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (AGHT) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang



Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

4. Permendagri Nomor 49 tahun 2010 tentang Pemantauan Orang asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah.
5. Permendagri Nomor 50 tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Asing di daerah.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/1514/SJ tanggal 9 Maret 2018 tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 370/SK-BUP/HK/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan

- : 1. Sebagai wadah/forum dalam pertukaran data dan informasi Intelijen sehingga dapat diolah menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Pimpinan Daerah (sebagai User) untuk mengambil kebijakan lebih lanjut dalam menjaga kondusifitas daerah.



2. Dalam rangka meningkatkan sinergitas dalam pertukaran data dan informasi tentang permasalahan yang bisa menjadi pemicu permasalahan konflik dimasing-masing OPD kemudian secara bersama menganalisa data dengan informasi intelijen untuk dihasilkan sebuah rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan strategis.
3. Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai institusi lintas sektoral yang melibatkan banyak orang dari unsur intelijen.
4. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengkompilasi dan mengkoordinasi informasi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Ketahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (IPELEKSOSBUDHANKAM) yang berpengaruh terhadap segala aspek yang menjadi hambatan, gangguan dan acaman kondisi yang kondusif terhadap kebijakan politik dalam negeri di daerah.
5. Melakukan kompilasi tukar-menukar informasi intelijen dari berbagai instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut baik tindakan preventif maupun refresif agar dapat mempertahankan kondisi yang kondusif.

Keanggotaan

1. Bupati Kutai Kartanegara (Ketua 1)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Ketua 2)
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Ketua 3)
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 1)
5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 2)
6. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan



- Politik Kabupaten Kutai Kartanegara
(Sekretaris/Pelaksana Harian 2)
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 9. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
 10. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;
 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Daerah Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu;
 13. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0906/TGR;
 14. Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kutai Kartanegara;
 15. Kasi Intel Kejaksaaan Negeri Kutai Kartanegara;
 16. Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 18. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
 19. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
 20. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
 21. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
 22. Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

23. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Nama Forum : **Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.**

Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
4. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 460/964.SJ tertanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam melaksanakan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 367/SK-BUP/HK/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan :1. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
2. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik dan upaya penanganannya;
3. Melakukan upaya-upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;



4. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik;
5. Mengkoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya penghentian konflik dalam skala Kecamatan;
6. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

Keanggotaan

- : 1. Bupati Kutai Kartanegara (Ketua)
2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 1);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 2);
4. Kapolres Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 3);
5. Dandim 0906/TGR (Wakil Ketua 4);
6. Kajari Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 5);
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris);
8. Kepala Bagian Operasi Polres Kutai Kartanegara (Wakil Sekretaris 1);
9. Perwira Seksi Operasi Kodim 0906/TGR (Wakil Sekretaris 2);
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;
17. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara Kabupaten Kutai Kartanegara;



18. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;

Kegiatan – Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk melalui Surat Keputusan No. 370/SK-BUP/HK/2021 tanggal 7 September 2021 yang bertujuan pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.

Fungsi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah dalam rangka :



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pertukaran informasi kewaspadaan secara dini.

Pendanaan kegiatan Kewaspadaan Dini Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara melalui :

Program : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Jenis Kegiatan : 1. Pemantauan deteksi (AGHT) di 18 Kecamatan.
2. Melaksanakan Kegiatan fungsi intelijen, yakni penyelidikan, pengamanan dan penggalangan atas sebuah kasus.
3. Rapat Koordinasi pembahasan permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah.
4. Pembuatan analisis dan rekomendasi (problem solving) atas permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah untuk disampaikan kepada pimpinan daerah untuk diambil kebijakan lebih lanjut.



5. Pembentukan Anggota Jaring Kominda di setiap Kecamatan sebagai pengumpul bahan keterangan (pulbaket) informasi, agar informasi dapat diperoleh secara cepat dan akurat (temu cepat, lapor cepat)

Koordinasi yang dilakukan oleh kominda dilakukan setiap bulan dan minimal setiap tiga bulan, untuk membahas isu-isu strategis atas informasi yang disampaikan oleh Anggota Jaring Agen Kominda di Kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil Rapat Kominda disusun sebagai rekomendasi kepada Pimpinan Daerah (Bupati) atas isu-isu aktual dan strategis.

2. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan diterbitkannya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 367/SK-BUP/HK/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
- c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik dan upaya penanganannya;
- d. Melakukan upaya-upaya pencegahan melalui system peringatan dini;



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

- e. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik;
- f. Mengkoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya penghentian konflik dalam skala Kecamatan;
- g. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

Untuk keterpaduan aksi pada masing-masing instansi yang bertanggung jawab atas tercapainya target maka kerangka kerja dari Tim Terpadu yang berisikan tahapan :

Pertama, Pembahasan Personalia Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan pelibatan SKPD dan instansi vertikal di daerah yang terkait.

Kedua, Penetapan pembagian tugas SKPD sebagai dalam kegiatan :

1. Pencegahan Konflik;
2. Penghentian / Penyelesaian Konflik
3. Pemulihan Pasca Konflik.

Ketiga, Penyusunan dan Pembahasan Rencana Aksi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dan penetapan Instansi Vertikal/ SKPD yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi.



RENCANA AKSI TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

A. PENCEGAHAN

1. Konflik Sosial

- a. Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter (3 RA)
- b. SARA (2 RA)
- c. Politik (1 RA)
- d. Ekonomi / Industrial (1 RA)

2. Dukungan Pelaporan Penanganan Pandemi Covid-19 (1 RA)

B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME

1. Penghentian Konflik / Terorisme (4 RA)

2. Penyelesaian Konflik Sosial Dan Terorisme

- a. Sebelum Tahun 2021 (1 RA)
- b. Sejak Tahun 2022 (2 RA)

C. PERCEPATAN PENEGAKAN HUKUM

- a. Sebelum Tahun 2021 (2 RA)
- b. Sejak Tahun 2021 (2 RA)

D. FASILITASI FORKOPIMDA, KEWASPADAAN DINI DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2021 (1 RA)

E. PELAPORAN PENANGANAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2021 (1 RA)

Pada tahun 2013 – 2014 pelaporan progress pelaksanaan rencana aksi terpadu disampaikan kepada Kemenko Polhukam / Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Pusat melalui sistem monitoring UKP4 seluruh data diupload (entry data) melalui website Serambi UKP4 : <http://serambi.ukp.go.id>. Dengan masa pelaporan B.03, B.06, B.09 dan B.12.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Mulai tahun 2015 hingga tahun 2020 pelaporan progress pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dilaporkan secara manual kepada Sekretariat Tim Terpadu Provinsi melalui Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dengan menyerahkan laporan berupa softcopy dan hardcopy data pendukung setiap rencana aksi yang dilaksanakan dengan masa pelaporan B04, B08 dan B12.

Masa Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi

Periode Pelaporan	Masa Pelaporan	Evaluasi Timdu Pusat
Periode B-04	27 April – 6 Mei 2021	5 Juni 2021
Periode B-08	27 Ags – 6 Okt 2021	8 September 2021
Periode B-12	27 Des – 6 Jan 2021	10 Januari 2021

Pada Tahun 2021 pelaporan progress capaian pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial dilaporkan melalui sistem penyimpanan data digital Google Drive yang dibangun oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

Semua data pendukung capaian target pelaksanaan rencana aksi diupload melalui akun : timdu_Kukar@gmail.com pada penyimpanan data digital Google Drive Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

Pendanaan kegiatan Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara melalui :



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

- Program : Peningkatan Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
- Kegiatan : Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah
- Jenis Kegiatan : 1. Pemantauan Pemantauan Gangguan Keamanan di 18 Kecamatan.
2. Melaksanakan Koordinasi penyelesaian konflik sosial dengan SKPD yang menjadi leading sektor terkait penyebab kejadian konflik.
3. Rapat Koordinasi pembahasan permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah.
4. Mensinergikan seluruh kegiatan rencana aksi kepada Instansi Vertikal di daerah dan SKPD terkait sebagai langkah memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir konflik yang muncul.
5. Melaporkan progres capaian pelaksanaan rencana aksi sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah

Pengukuran realisasi kegiatan untuk kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini di daerah sangat sulit, karena output dari kegiatan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Namun pengukuran realisasi kegiatan kominda adalah sejauhmana



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

fungsi dan peran Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat melakukan langkah deteksi dini dan cegah dini permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan yang tidak menjadi konflik yang meluas dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan dengan menitik beratkan pada Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Daerah dan Nasional, dengan bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan). Berikut ini disampaikan garis besar hasil pemantauan deteksi dini di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2021 :

Isu Strategis dan Permasalahan Aktual berdasarkan Pengumpulan Informasi Deteksi Dini

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
Ideologi	1. Keberadaan Penganut Agama Baha'i	Tenggarong	<ul style="list-style-type: none">Jumlah pengikut \pm 70-80 orangTerjadi tuntutan pengikut untuk pencantuman identitas keagamaan dalam administrasi kependudukan dan sekolah.
	2. Keberadaan Organisasi Islam Garis Keras "Khilafatul Muslimin"	Jahab, Tenggarong	Jumlah pengikut \pm 20-50 orang
	3. Keberadaan Faham Aliran Syiah	Tenggarong	<ul style="list-style-type: none">Jumlah pengikut \pm 40-100 orangTelah membentuk Yayasan untuk kegiatan sosial dengan nama yayasan "GHIPARI"Pada tahun 2016, penganut faham Syiah telah membentuk Ormas yang bernama Pada Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara.Untuk diketahui bahwa organisasi



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
			kemasyarakatan (ormas) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKT No. 00-23-01-0005/II/2016 dengan Ketua Bintoro Wibono dan Sekretaris Ahmad Fauzi.
Politik	Suksesi Pimpinan dan pengurus Partai Politik di Kabupaten Kutai Kartanegara, yangmana banyak kepentingan agenda politik Daerah maupun agenda kepemimpinan Nasional menghadapi Pemilu 2024	Kabupaten Kutai Kartanegara	<ul style="list-style-type: none"> Adanya upaya menguasai pimpinan Partai Politik di Daerah dalam rangka mengamankan agenda politik pada pemilihan Bupati dan Gubernur. Membangun kekuatan untuk menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2024.
Ekonomi	1. Potensi Gangguan Keamanan akibat banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang Tambang Batubara yang tidak beroperasi.	Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Banyaknya Perusahaan yang belum menyelesaikan hak-hak karyawan yang telah di PHK
	2. Banyaknya terjadi peselisihan antara warga masyarakat dengan perusahaan terkait lahan/SDA	• Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara dan perkebunan Kelapa Sawit	
	3. Gesekan antar warga dengan perusahaan pemanfatan koridor batubara (eks Tambang)	• Kecamatan Lokasi Perusahaan BatubaraKoridor	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan jalan umum untuk kegiatan hauling menuju stock pile yang meresahkan masyarakat karena jalan umum menjadi rusak Meningkatnya kejadian banjir dikala hujan
Sosial Budaya	Ormas berlatar belakang Kedaerahan	18 Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Kehadiran Ormas kedaerahan yang meresahkan masyarakat karena sering menimbulkan



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Keterangan
			<p>konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ormas kedaerahan yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan/pengusaha untuk mengintimidasi pihak lain • Ormas kedaerahan yang menjadi preman bagi perusahaan
	Pandemi COVID-19	18 Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terkendalinya penyebaran COVID-19 • Semakin menurunnya kepedulian dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan • Terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat • Penyerabaran masyarakat yang terpapar COVID-19 semakin meluas ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara
Hankam	Penyebaran paham radikal dan terorisme	Kecamatan di daerah Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Persembunyian pelaku BOM Bali I di Tanjung Berukang Anggana tahun 2002 • Penangkapan Teroris di Loa Janan Kab. Kukar tahun 2011 • Simpatisan kelompok radikal kanan
		Tenggarong, Loa Duri dan Loa Janan	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) narapidana teroris yang akan berakhir masa pidananya dan akan kembali kepada masyarakat, sehingga perlun pengawasan dari pihak terkait. • Adanya kemungkinan sel-sel pengikut Jamaah Asharut Daulah yang terus hidup dan berkembang di Kutai Kartanegara



b. Realisasi Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Meningkatnya intensitas konflik sosial bersifat horizontal dan vertikal beberapa tahun terakhir, memposisikan penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi sulit. Kelemahan pemerintah dalam menangani kasus konflik sosial menjadi celah institusi sosial yang diperankan tokoh-tokoh radikal menggantikan fungsi dan peran pemerintah, akibatnya konflik sosial semakin merata penyebarannya.

Beberapa permasalahan yang bisa memicu terjadinya konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini baik konflik yang berlatar belakang Sumber Daya Alam, Lahan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hubungan Industrial Ketenaga kerjaan, batas wilayah maupun konflik antar Etnis dan Agama (SARA).

Berikut Data penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2021 :

**Rekapitulasi Data
Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021**

No	Penanganan Konflik Sosial	Bulan												Jumlah	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Pemantauan Orang Asing / Tenaga Kerja Asing (Rakor dan Monitoring/Sidak)						2								2
2	Penanganan Tindak Kriminal pemicu Konflik SARA	1												1	2
3	Penanganan Prostitusi dan penyakit masyarakat														0
4	Penanganan Kepegawaian ASN/THL/Staf Desa/Kel Kab. Kutai Kartanegara														0
5	Penanganan Konflik Antar Umat Beragama						4								4
6	Penanganan (Mediasi) Konflik Hubungan Industrial			2											0
7	Mediasi tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik (PLN/PDAM dll)														0



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

No	Penanganan Konflik Sosial	Bulan												Jumlah	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
8	Penanganan Konflik Masyarakat dengan Perusahaan														-
	- Melibatkan Ormas/LSM														-
	- Hanya Kelompok Masyarakat			2		1	1				2				6
9	Penanganan Konflik Peningkatan Suhu Politik							1							1
10	Deradikalisme Penanggulangan Paham Radikal														
11	Penanganan Jaringan Teroris dan organisasi radikal			1						1					2
12	penanganan konflik lahan (SDA) atas klaim antar kelompok masyarakat	1	1	3											5
13	Pemantauan dan Penggalangan Napiter														0
14	Penanganan Konflik Pemerintah dengan perusahaan / pengusaha														0
15	Penanganan yang mengarah pada konflik SARA	1			1										2
16	Rakor Tim Pakem Kukar												1		1
17	Rakor Penanganan Konflik														
	- Politik														0
	- Lahan SDA / Pertambangan														0
	- Kewaspadaan														0
	- Sosial Budaya			1	2										3
	- Ketenaga Kerjaan														0
Jumlah Penanganan Konflik Sosial		6	6	7	4	1	6	1	2	0	2	0	2		31



Rekapitulasi Data Penanganan Aspirasi Politik di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021

No	Penanganan Aspirasi Politik	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Konflik Pilkada		2											2
2	Sengketa Dualisme Pengurus Partai Politik dan Ormas													0
Jumlah Penanganan Aspirasi Politik		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

B. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi Konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme, atau lainnya

Berdasarkan pantauan, Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menginventarisir pemasalahan aktual pada tahun 2021, diantaranya tumpang tindih kepemilikan lahan, demonstrasi tenaga kerja, aliran semapalan keagamaan, konflik sosial bernuansa SARA, dan pemasalahan lainnya sebagai berikut :

Penanganan Kejadian konflik yang berlatarbelakang SARA pada tahun 2021

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
1.	• 11 Januari 2021	Remaja Suku Bugis dan Remaja Suku Sasak	<p>Konflik Sosial bernuansa SARA di Dusun Sumber Agung Desa Muara Kaman Ilir – Perkelahian Remaja Warga Sasak dengan warga Bugis.</p> <p>Perkelahian remaja berujung maut terjadi di Perkebunan Sawit, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara (Kukar). Nafis Azahara (21) tewas mengenaskan. Senin (11/1/2021) Pukul 23.00 Wita. Tubuhnya jadi sasaran tikaman Afdal.</p> <p>Untuk meredam terjadinya konflik yang bernuansa SARA, Pemerintah Kecamatan</p>	<p>Sebagai tidak lanjut pertemuan tersebut maka Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 09.00 Wita dilaksanakan silaturahmi warga masyarakat setempat akibat insiden perkelahian tersebut. Kegiatan Doa Bersama Dan Silaturahmi Antara Tokoh Masyarakat Sulawesi Selatan dan Tokoh Masyarakat Suku Sasak/Lombok yang</p>



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			dan Polsek Muara Kaman, bergerak cepat untuk meredam keadaan agar tetap kondusif. Menyikapi kejadian tersebut Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta Polres, Kodim, dan FPK dan Paguyuban melakukan pertemuan pada tanggal 13 Januari 2021 untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan terjadinya konflik yang lebih besar.	tergabung dalam Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pengurus Forum pembauran Kebangsaan Kecamatan Muara Kaman

Penanganan/Mediasi konflik Sosial yang berlatarbelakang Politik pada tahun 2021

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
1.	• 22 Juli 2021	Peserta Pilkades Kota Bangun II atasnama Joko Purnomo dan Andik Prasetyo (mantan Sekretaris Desa Kota Bangun II yang juga calon kepala desa menggugat ke PTUN)	<p>Pada Hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 10.05 wita bertempat di BPU Kantor Camat Kota Bangun telah dilaksanakan kegiatan Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah Hasil Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II tahun 2019.</p> <p>Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 108 desa di 16 kecamatan di Kutai Kartanegara pada hari Kamis 16 Oktober 2019 yang lalu masih menyisakan persoalan yakni gugatan dari salah satu kandidat calon kepala desa di Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun.</p> <p>Dengan gugatan itu, status Joko Purnomo atau kursi Kepala Desa Kota Bangun II masih akan ditentukan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Joko Purnomo merupakan kandidat kepala desa yang dinyatakan mengantongi suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pilkades serentak di Kutai Kartanegara pada 16 Oktober 2019, pilkades Kota Bangun II diikuti empat calon, mereka yakni Toto Hamdani nomor urut 1 dengan 18 suara, Sukma Wardani nomor urut 2 dengan 153 suara, Joko Purnomo nomor urut 3 dengan 544 suara dan Andik Prasetyo nomor urut 4 dengan 391 suara.</p>	<p>Menindaklanjuti putusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan Penghitungan Ulang Suara Tidak Sah yang direncanakan pada hari Kamis 22 Juli 2021 bertempat di Kecamatan.</p> <p>Adapun Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kota Bangun II tahun 2019 sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon No. Urut 1 Sdr. TOTO HAMDANI sebanyak : 18 suara 2. Calon No. Urut 2 Sdr. SUKMA WARDANI sebanyak 153 suara 3. Calon No. Urut 3 Sdr. JOKO PURNOMO sebanyak 544 suara 4. Calon No. Urut 4 sdr. ANDIK PRASETYO sebanyak 391 suara <p>Hasil Perolehan Suara pada Penghitungan Ulang Surat Suara tidak Sah sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No. Urut 1 Sdr. TOTO HAMDANI sebanyak : 6 suara 2. No. Urut 2 Sdr. SUKMA WARDANI sebanyak 43 suara



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>Atas hasil tersebut yang kemudian ditetapkan oleh bupati dengan mengangkat Joko Purnomo sebagai Kades. Sementara Andik Prasetyo mantan Sekretaris Desa Kota Bangun II yang juga calon kepala desa menggugat ke PTUN setelah sebelumnya melayangkan surat ke Camat Kota Bangun, Ketua DPRD hingga ke Bupati Kutai Kartanegara.</p> <p>Berdasarkan Putusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 April 2021 terkait Gugatan Perkara Tata Usaha Negara 3/G/2020/PTUN-Smd Jo. 218/B/2020/PT.TUN.JKT. Bahwa dalam sengketa antar pihak pada Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 di Kota Bangun II Kecamatan.</p>	<p>3. No. Urut 3 Sdr. JOKO PURNOMO sebanyak 172 suara 4. No. Urut 4 sdr. ANDIK PRASETYO sebanyak 129 suara</p> <p>Hasil Final Perolehan Suara Pllkades Kota Bangun II sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. TOTO HAMDANI = 24 suara 2. Sdr. SUKMA WARDANI = 196 suara 3. Sdr. JOKO PURNOMO = 716 suara 4. Sdr. ANDIK PRASETYO = 520 suara

Penanganan/Mediasi konflik Sosial yang berlatarbelakang Hubungan Industrial (ketenagakerjaan) pada tahun 2021

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
1.	29Maret 2021	Perwakilan Karyawan PT PCP (Prima Citra perdana) dg Menegemen PT PCP.)Prima Citra Perdana	<p>mediasi antara perwakilan karyawan PT PCP dg pihak Menegemen PT PCP (Prima Citra Perdana) Yg di hadiri 10 org.</p> <p>Hadir dalam mediasi sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Firman Hidayat. S.sos .M.Si.(Bagian sengketa Disnakertran). - Djarot (Meneger HRD lapangan PT PCP) - Suryanata (HRD PT PCP). - Imam Sholikin (HRD PT PCP - Hasanundin (Bagian Pengamanan PT PCP). - Faturahaman (Perwakilan Karyawan PT PCP - Wahyudi (Perwakilan Karyawan PT PCP) - Iriansyah(Perwakilan Karyawan PT PCP) - Yusup (Perwakilan PT PCP) <p>Konflik hubungan industrial antara PT. PCP dan Karyawan yang menuntut agar</p>	<p>Adapun hasil mediasi kedua belah pihak sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antara Perwakilan Karyawan PT PCP dengan Menegemen PT PCP sampai saat ini tdk mendapatkan kesepakatan mengenai tuntutan Karyawan kepada pihak menegemen. - maka Disnakertran dalam hal ini bidang sengketa atau PHI dan juga sbg mediator kedua belah pihak akan memberikan atau melayangkan surat anjuran kepada kedua belah pihak terhitung 10 hari dari mediasi yg di lakukan tgl 29 Maret 2021 yg nanti permasalahan ini akan di lanjutkan ke pengadilan.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

		perusahaan memberikan kenaikan gaji sesuai UMK Sektoral namun yang terjadi pihak perusahaan malah mengurangi tunjangan kehadiran dari Rp. 115.000 menjadi Rp. 32.500/hari kerja.	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Aksi Unjuk Rasa Berlatarbelakang Sosial Budaya pada tahun 2021

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
1.	• 27 Maret 2021	rganisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (LPADKT-KU) dengan Ormas Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak).	<p>Persetereuan antar Ormas di lokasi Tambang Batubara PT. Bukit Baiduri Energy (PT. BBE) Desa Karang Tunggal Kec. Tenggarong Seberang</p> <p>Di lokasi Tambang Batubara PT. Bukit Baiduri Energy (PT. BBE) Desa Karang Tunggal Kec. Tenggarong Seberang, terjadi Perkelahian antar anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (LPADKT-KU) dengan Ormas Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak).</p> <p>Ormas Gepak, menerima kuasa dari Yudha (Masyarakat pemilik lahan) dan Ormas LPADKT-KU menerima kuasa dari PT. Mitra Abadi Mahakam (PT. MAM).</p> <p>PT. MAM merupakan kontraktor PT. BBE, untuk menambang dan mengangkut batubara (houling Batubara). Terjadi hubungan sewa menyewa lahan yang digunakan houling batubara milik PT. BBE, oleh PT. MAM ke Yudha (pemilik lahan).</p> <p>Permasalahan, berawal dari terjadi keterlambatan pembayaran sewa lahan, dari PT. MAM ke Yudha.</p> <p>Pukul 13.00 wita, sekitar 15 Anggota Ormas Gepak menggunakan 6 mobil (Jenis Pajero, Fortuner dan Avansa) mendatangi lokasi dan melakukan penutupan jalur houling.</p> <p>Pada pukul 15.30 Wita, anggota Ormas LPADKT-KU berjumlah sekitar 20 orang menggunakan mandau (senjata tajam) dipimpin Efendi (Ketua Cabang LPADKT-KU Kab. Kukar), melakukan penyerangan terhadap anggota Ormas Gepak (10 orang), yang melakukan penutupan houling.</p>	<p>Pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 21.30 telah diadakan pertemuan dengan kelompok Ormas Gepak dengan unsur Apkam wilayah dilokasi houling PT. MAM di Ds. Karang Tunggal Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar.</p> <p>Hadir dalam pertemuan Kasat Intel Polres Kukar AKP Urdianta Asta Praja, Danramil 14/Tgrs Kpt Bahri Yusmulyanto, Wakapolsek Tgrs Ipda Hadi, Kanit Intel Polsek Ipda Nelson, Kanit Reskrim Aiptu Warsono. Sdr Arma, Gepak, Sdr Herlian, Ketua Gepak Tenggarong Seberang. Dengan hasil pertemuan : Pihak Gepak bersedia untuk saling menjaga keamanan dan menyerahkan permasalahan kepada pihak Kepolisian. Permasalahan akan diselesaikan dengan musyawarah dan siap di mediasi oleh aparat.</p> <p>Pada pukul 22.00 Wita, diadakan pertemuan dengan Ormas LPDKT KU di rumah sdr Evendi alias Pet di Ds. Karang Tunggal Kec. Tengarong Seberang, hasil pertemuan LPDKT bertanggung jawab atas kejadian keributan tersebut dan bersedia untuk menyerahkan pelaku perusahaan mobil.</p>
2.	17 Februari 2020	Penyebar Aliran Kepercayaan yang menyimpang	<p>Keberadaan Aliran Agama Yang Menyimpang Di Desa Handil</p> <p>Berawal informasi yang disampaikan Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Rakyat (Kesra)</p>	Badan Kesbanpol Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pendalaman permasalahan dilokasi tempat penyebaran aliran



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			<p>Desa Handil Terusan Muhammad Lukman pada acara pembinaan FKUB pada tanggal 31 Mei 2021 di Kecamatan Anggana, disampaikan adanya penyebaran aliran agama Islam di Handil A desa Handil Terusan yang dinilai berbeda dengan ajaran agama Islam yang ada, masyarakat Handil A mulai merasa resah dikarena terjadinya perubahan sikap warga yang menjadi pengikut aliran tersebut dengan tidak lagi mengikuti sholat berjamaah di mesjid maupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti kegiatan Sholawatan dan kegiatan IRMA.</p> <p>Berdasarkan informasi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 3-4 Juni 2021 melaksanakan monitoring dan pendalaman tentang keberadaan dan penyebaran aliran tersebut bertempat di Masjid Al Falah Handil A Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana, dengan melakukan wawancara beberapa narasumber seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> Muhammad Luqman, SE - Kaur Kesra Desa Handil Terusan, Pengurus Mesjid Al Falah Handil A Desa Handil Terusan. Abdul Rahman - warga Handil A (pernah mengikuti pengajian). Roni - warga Handil A (pernah mengikuti pengajian). Ibu-ibu pengajian/sholawatan dan anggota IRMA sebanyak 8 (delapan) orang. 	<p>menyimpang, dan kemudian melakukan rapat koordinasi dengan MUI, Kejaksaan, Aparat keamanan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.</p> <p>Disepakati permasalahan tersebut akan didalam dalam rapat-rapat Tim PAKEM Kejaksaan.</p>
3.	7 Juni 2021	Setia Budi	<p>Penghentian Pembangunan Mushola At-Taubah Desa Teluk Dalam.</p> <p>Senin, tanggal 7 Juni 2021 - Penghentian Pembangunan Mushola At- Taubah Desa Teluk Dalam (depan RS Parikesit) karena tidak memiliki Izin Khusus Rumah Ibadah Sesuai Skb 2 Mentri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006.</p>	<p>Pembanguna Mushola diatas tanah milik Pemda Kutai Kartanegara, selin itu pembangunan mushola tersebut tidak memiliki izin sesuai Skb 2 Mentri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006.</p> <p>Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan beberapa rapat koordinasi untuk mengentikan pembangunan mushola dan kejelasan status kepemilikan lahan tersebut.</p>
4.	20 Oktober 2021	37 ormas diwilayah Kalimantan Timur yang gagas Remaong Kutai	<p>Aksi Penolakan Pendirian Ormas Pemuda Batak Besatu oleh 37 ormas diwilayah Kalimantan Timur yang gagas Remaong Kutai Berjaya.</p> <p>Kegiatan Dilaksanakan Pada pukul 10.30</p>	<p>Adapun alasan penolakan/tidak setuju akan berdirinya Ormas Pemuda Batak Bersatu (PBB) di Kalimantan Timur sebagai</p>



NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
		Berjaya.	<p>Wita tanggal 20 Oktober 2021 bertempat di aula Kedaton Kutai Kartanegara Dihadiri sekitar 200 orang lebih terdiri dari anggota Ormas yang di undang.</p> <p>Sehingga pada tanggal 18 Oktober 2021 Menteri Adat Haji Adji Pangeran Hario Soerya Adi Kusuma mengeluarkan surat Pencambutan dukungan pendirian Ormas Pemuda Batak Besatu.</p>	<p>berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beredarnya video dan pemberitaan di media massa perselisihan antara ormas Pemuda Batak bersatu dengan ormas kedaerahan Di mana tempat mereka berdiri dan tidak mau itu terjadi di daerah kami. 2. Kearifan lokal di mana kami sangat menjunjung tinggi dan menghormati adat-istiadat dan budaya kami di Kalimantan Timur jadi tidak ada adat yang berdiri di atas adat. 3. Agar terciptanya kondusifitas antara suku yang ada di Kalimantan Timur.
5	<ul style="list-style-type: none"> • 27 Desember 2021 	Ormas Remaong Kutai Berjaya	<p>Penolak Perubahan Warna Jembatan Kutai Kartanegara</p> <p>Keputusan pemilihan warna jembatan kebanggaan masyarakat Kota Raja itu dari warna kuning menjadi warna merah dan putih, mendapat reaksi penolakan masyarakat. Beredarnya pesan singkat dan meme di grup WA serta Facebook telah ramai dan kemudian berkembang terjadinya aksi damai massa pada tanggal 27 Desember 2021 yang motori oleh ormas Remaong Kutai Berjaya (dipimpin etum DPP RKB, Hebby Nurlan Arafat) dengan mengajak ormas-ormas lain seperti Bubuhan Banjar Kayuh Baimbai, serta beberapa orang dari pihak kesultanan.</p> <p>Menurut klarifikasi Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Kukar Restu Irawan bahwa Perubahan warna Jembatan Kartanegara dipastikan sudah meminta pertimbangan dari pihak berwenang seperti Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan (KKJT) dan tokoh masyarakat adat. Penggunaan warna merah dan putih dinilai lebih terang, membuat tingkat keselamatan pelayaran di Sungai Mahakam makin tinggi. Dengan demikian, penggunaan warna merah dan putih tidak ada sangkut paut dengan politik apalagi mengubah ciri khas adat.</p> <p>Salah satu kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Aji Raden Sofyan Effendi (Dosen Universitas Mulawarman) ikut bersuara sebagaimana</p>	<p>Bupati bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 13 Januari 2022 menerima pimpinan perkumpulan adat Remaong Kutai Berjaya (RKB) yang mengatasnamakan sebagai masyarakat adat, dalam rangka rapat tindak lanjut permasalahan perubahan warna jembatan Kutai Kartanegara Tenggarong, di ruang Tribrata Polres Kukar. Dalam pertemuan tersebut Bupati menegaskan bahwa perubahan warna jembatan ini tidak ada kaitannya dengan urusan politik, tetapi atas pertimbangan aspek teknis yang dijabarkan oleh Dinas PU berkaitan dengan faktor keselamatan pelayaran dan warna merah putih merupakan simbol negara.</p>



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
			yang ditulis pada media online nomorsatu.com atas rencana mengubah warna Jembatan Kartanegara. Dosen Universitas Mulawarman itu mengakui jika Jembatan Kartanegara merupakan milik publik yang berada wilayah publik. "itu memang milik masyarakat. Sehingga setidaknya sebelum mengambil kebijakan, pemkab bisa mempelajari akar budaya dan adat istiadat setempat,"	

Penanganan Aksi Terorisme

NO	WAKTU KEJADIAN	PELAKU ATAU PIHAK YANG BERSETERU	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	TUNTUTAN DAN LANGKAH PENANGANAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> 10 Agustus 2021 	Kelompok Khilafatul Muslimin di Kabupaten Kutai kartanegara	<p>Keberadaan Kelompok Khilafatul Muslimin di Kabupaten Kutai kartanegara semakin menunjukkan eksistensinya, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Kelompok Khilafatul Muslimin Kegiatan Jalan Sehat Jamaah dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1443 H yang di ikuti ± 80 orang (yang berasal dari Balikpapan dan PPU) di pimpin oleh Amir Wilayah Borneo Ust.Amiruddin Dewa. Dengan rencana titik start jalan santai di Pasar Seni Tenggarong dan titik finish di Ponpes Khilafatul Muslimin di Kel. Jahab. Namun rencana tersebut dilarang aparat keamanan, sehingga dirubah jalan santai dimulai di terminal Timbau (Jl. Belida) menuju Ponpes.</p> <p>Dalam jalan santai tersebut Bendera Khilafatul Muslimin bertafazzkan kalimat" Lailahailallah Muhammaddar Rasulallah". Dengan membawa Tulisan (Spanduk/Pamflet) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Indonesia titik awal kebangkitan Islam dunia. Berkhilafah adalah kewajiban tidak dapat di tunda. Khilafatul Muslimin bukan negara tetapi Al-Jamaah. Kegiatan ini adalah ibadah tidak dapat di tunda. Sudah saatnya songsong era kebangkitan Khilafah. Islam tidak mengajarkan untuk berpecah belah. Tahun baru Islam adalah kebangkitan 	<p>Berdasarkan Release Kepolisian Lembaga Riset TerorisInternasional-TRAC (TerrorismResearch and AnalysisConsortium) memasukkanKhilafatul Muslimin ke dalam salahsatu organisasi radikal karenaberafiliasi dengan ISIS.</p> <p>Keberadaankelompok KhilafatulMuslimin di Kutai Kartanegaraterdeksi pada tahun 2014. yang diketuai olehKusnandi Ketua Kepengurusan Wilayah).</p> <p>Saat ini pemerintah daerah bersama aparat intelijen dan aparat keamanan terus memonitoring kegiatan kelompok ini, karena untuk menindak tegas ataupun pelarangan kegiatan belum ada keputusan pemerintah pusat yang melarang secara resmi.</p>



			seluruh umat Islam. h. Makhluk pertama yang menolak Khilafah adalah iblis. i. Pendidikan Islam berbasis Khilafah. j. Sudah saatnya Khilafah memimpin muslim dunia. k. Tidak bersatu dalam Khilafah adalah kemusyrikan yang nyata	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis III sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang dan Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2019	2020	2021
Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang	100%	58,32%	70,73%	94,20%
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud	100%	60%	80,00%	92,25%

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, pada indikator Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang tidak tercapai namun meningkat dari tahun sebelumnya, berikut analisis dari kedua indikator tersebut :



a. Indikator I : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan dan ketahanan bangsa dengan tujuan dan sasaran wawasan kebangsaan sebagai berikut :

1. Bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera
2. Terjaganya sejarah kebangsaan indonesia dan cinta NKRI
3. Revitalisasi dan reaktualiasi nilai nilai pancasila
4. Secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan dan mencegah disintegrasi bangsa
5. Meningkatkan kualitas penangkal dunia maya demi lestariya bangsa.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa salah satu tugas Badan Kesbangpol adalah pembentukan karakter kebangsaan kepada aparatur dan masyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa termasuk didalamnya pencegahan konflik di masyarakat dan golongan. Untuk itu pada indikator ini Badan Kesbangpol telah melakukan berbagai upaya penyuluhan dan sosialisasi masalah wasbang dengan kelompok sasaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Pelajar dan Mahasiswa dengan harapan mereka bisa memahami dan melaksanakan terkait dengan wawasan kebangsaan

Dalam hal ini Badan Kesbangpol dan Mas telah melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut dengan kegiatan Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan, Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wasbang dan Peringatan hari-Hari Besar/Nasional, dengan target capaian



pada tahun 2021 sebesar 100% dan hanya terealisasi sebesar 94,20%. Dalam hal pencapaian pada indikator ini bukan merupakan hal mendasar namun hanya pada tingkat kehadiran peserta pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan, dimana pada kegiatan Pembinaan dan penyuluhan terkendala dengan pembatasan jumlah peserta dan ditundanya beberapa kegiatan di kecamatan akibat dari Pandemi Covid-19.

Indikator II : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud

Perkembangan teknologi informatika saat ini telah menampilkan dua sisi yang berbeda disaat bersamaan, kemajuan teknologi telah membuat kehidupan semakin mudah dan canggih, disisi lain juga berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda saat ini. Krisis ekonomi sebagai dampak globalisasi yang terjadi telah menjajah kalangan menengah kebawah yang tersisih dari pergeseran zaman, hal tersebut banyak merubah tatanan kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat, sehingga menjadi ancaman serius terhadap etika dan moral bangsa, semua tercermin dari meningkatnya tindakan penyakit masyarakat

Melihat pokok permasalahan diatas Badan Kesbangpol berupaya untuk menekan jumlah kasus penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dari seluruh upaya yang telah dilakukan secara maksimal ditargetkan pada tahun 2020 jumlah kasus bisa turun hingga 205 kasus karena dari tahun 2012 jumlah 186 kasus terus menurun hingga pada 2013 menjadi 161, namun pada tahun 2014 ternyata makin meningkat hingga 170 kasus dan tahun 2015 makin meningkat menjadi 224 kasus selanjutnya pada tahun 2016 meningkat lebih ekstrim menjadi 713 kasus dan pada tahun 2017 telah menurun menjadi 469 kasus kemudian pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 359 kasus



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

dan pada tahun 2019 menurun sedikit menjadi 318 kasus, namun belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator ini gagal tercapai dari target 205 kasus pada 2019, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan ditemukan bahwa peningkatan kasus yang sangat tinggi ini merupakan kegagalan pencapaian dalam hal penurunan jumlah kasus penyakit masyarakat, namun jika dilihat lebih rinci bahwa kasus yang paling tinggi adalah narkoba, hal ini juga disebabkan oleh adanya operasi dari pihak kepolisian dengan sandi “Operasi Bersinar” sehingga pada tahun 2018 dan 2019 seluruh kejahatan narkoba dapat dibongkar, dengan harapan pada tahun berikutnya jumlah kasus ini akan berkurang. Untuk kasus lain terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya kegiatan yang dilaksanakan masih belum menyentuh kepada sasaran yang ingin diberikan penyuluhan, disamping anggaran yang minim juga karena kebanyakan pelaku kasus tersebut adalah para pemuda dan walaupun telah dirangkul namun karena terputusnya program pembinaan dan kurang luasnya cakupan peserta di tiap kecamatan dan desa/kelurahan, walaupun tiap kegiatan sudah dilaksanakan, dalam kasus ini perlu pendalaman lagi setelah pelaksanaan penyuluhan agar hasil yang didapat lebih baik dengan turunnya angka kriminalitas. Kasus yang sangat tinggi terdapat pada Narkoba, inilah yang menjadi faktor utama dalam pemberantasan kasus penyakit masyarakat dan sesuai permendagri nomor 21 tahun 2013 Badan Kesbangol



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

menjadi fasilitator dalam pencegahan peredaran narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan Badan Kesbangpol sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada para pelajar khususnya dan kalangan masyarakat pada umumnya tentang bahaya narkoba dengan berkerjasama dengan BNK dan Dinas Kesehatan sebagai narasumber. Dan setelah penyuluhan dilaksanakan Tes Urin kepada para peserta dan hasil yang didapat semuanya menunjukkan negative dalam pemakaian narkoba.
2. Pelaksanaan Tes Urin bagi para aparaturnya Badan Kesbangpol dalam 2 tahun berturut-turut, dengan harapan para aparaturnya bisa terbebas dari narkoba.
3. Menghimbau kepada seluruh OPD untuk dapat melaksanakan Tes Urin bebas narkoba.

Berikut disampaikan data pantauan kasus penyakit masyarakat di Kutai Kartanegara :

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2019 – 2021

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021
1	Narkoba	219	28	224
2	Pembunuhan	3	3	3
3	Kejahatan Seksual	24	12	1
4	Penganiayaan	13	8	22
5	Pencurian	33	41	17
6	Eksplotasi Anak Bawah Umur	22	15	24
7	Premanisme	4	8	0



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

	JUMLAH	318	115	291

Dari data diatas jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2021 sebanyak 291 kasus, telah terjadi peningkatan yang signifikan sebanyak 176 kasus dari tahun 2020 dengan target jumlah kasus sebanyak 115, peningkatan kasus ini merupakan suatu penurunan namun juga merupakan kegagalan pencapaian dalam hal penurunan jumlah kasus penyakit masyarakat, Untuk kasus lain terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya.

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis IV sebagaimana diatas, diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik, Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi dan Persentase Parpol Yang Tertib Administrasi, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :



Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2019	2020	2021
Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik	100%	60%	79,18%	100%
Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	100%	40%	80%	56,67%
Persentase Parpol Yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%	93,75%

Dari 3 (tiga) indikator tersebut diatas, pada indikator persentase ormas yang tertib administrasi yang belum mencapai target, karena tidak tercapainya ormas yang difasilitasi pada tahun 2021, sementara 2 (dua) indikator telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga secara keseluruhan pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini telah berhasil, berikut analisis dari ketiga indikator tersebut :

a. Indikator 1 : Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik

Dengan melihat data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu periode 2015 – 2020 yang tertinggi terdapat pada Pemilihan Legislatif dan Presiden Serentak tahun 2019 sebesar 81,24 % karena banyak kepentingan politik pada proses pemilihan ini, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 70 % dimana menurunnya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau dengan kata lain jumlah golput (Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) semakin meningkat. Maka Badan Kesbangpol harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong daerah yang potensi Pemilih yang



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

tidak menggunakan hak pilih tinggi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pemilih :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi (apatis)
2. Kurangnya sosialisasi tentang Pemilu ke pelosok kecamatan dan desa/kelurahan
3. Metode sosialisasi yang belum atraktif dan belum menyentuh kepada para pemilih potensial (pemilih pemula)
4. Kekecewaan masyarakat terhadap produk hasil pemilu sebelumnya

Inilah faktor penyebab masih terdapat rendahnya angka partisipasi pemilih sebagai penunjang keberhasilan berdemokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kesbangpol telah berupaya maksimal dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk Pemilu berikutnya. Dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Kesbangpol telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun secara keseluruhan tingkat partisipasi ini masih baik karena masih diatas 50% yang berarti capaian ini harus ditingkatkan lagi.

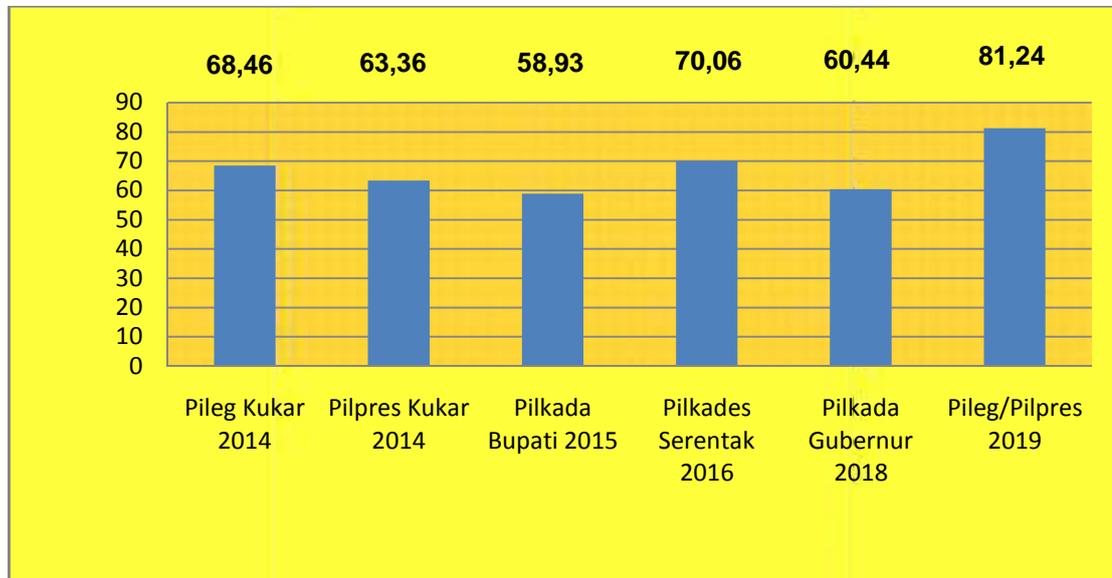
Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan data dan grafik Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu sebagai berikut :

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada Tahun 2015-2020

INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup : 58,93%	Pilkades : 70,06%	Pilgub : 60,44	Pileg/Pilpr e 81,24	Pilbup 57,00



GRAFIK PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



b. Indikator II : Persenstase Ormas Yang Tertib Administrasi

Dalam indikator yang kedua ini, digambarkan Prosentase Ormas Yang Tertib Administrasi, pada indikator ini telah ditetapkan target 100% dengan realisasi 80% sehingga capaian 88%, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, maka persyaratan pendaftaran ormas telah diperketat sehingga hanya ormas yang sudah memiliki cabang induk di Kabupaten yang bisa mendaftarkan ormasnya dan pada tahun ini ormas yang mendaftar mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 16 ormas menjadi 17 ormas pada tahun 2021, meskipun meningkat, namun peningkatan ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebanyak 30 ormas, selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 disebutkan bahwa ormas diperbolehkan untuk tidak terdaftar, yang membuat ormas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan pendaftaran ormasnya dan Bdan Kesbangpol memiliki tugas untuk tetap



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

memonitoring dan mengawasi keberadaan ormas yang belum terdaftar di setiap terdaapt kegiatan dari ormas tersebut, ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang berorganiasi mengalami peningkatan. Sehingga bisa tertib dalam administrasi. Dan mulai pada tahun 2018 pendaftaran ormas telah melalui Kemendagri melalui Ditjen Polpum.

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar

tahun 2016 – 2021

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	ORMAS	-	2	3	4	12	10
2.	OKP	3	-	-	-	-	-
3.	LSM	-	2	-	2	-	2
4.	PAGUYUBAN	3	-	2	3	-	-
5.	AGAMA	1	-	-	1	2	1
6.	PROFESI	10	3	2	-	-	-
7.	LEMBAGA ADAT	2	2	1	-	-	-
8.	YAYASAN	-	-	-	2	2	4
	JUMLAH	19	9	8	12	16	17



Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar tahun 2021 (berdasarkan sebaran di kecamatan)

No	Kecamatan	Ormas	OKP	LSM	Paguyuban	Keagamaan	Profesi	Yayasan	Jumlah
1	Marangkayu	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Muara badak	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Samboja	1	-	-	-	-	-	1	2
4	Muara Jawa	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Sanga-sanga	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Anggana	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Loa Janan	1	-	-	-	-	-	-	1
8	Loa Kulu	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Tenggarong Seberang	1	-	-	-	-	-	-	1
10	Tenggarong	6	-	1	-	1	-	1	9
11	Sebulu	-	-	-	-	-	-	1	1
12	Muara Kaman	1	-	-	-	-	-	-	1
13	Kota bangun	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Muara Wis	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Muara Muntai	-	-	-	-	-	-	-	0
16	Kenohan	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Kembang janggut	-	-	1	-	-	-	-	1
18	Tabang	-	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	10	0	2	0	1	0	4	17

c. Indikator III : Persentase Parpol Yang Tertib Administrasi

Terkait dengan parpol pada fasilitasi bantuan keuangan partai politik untuk tahun 2021, seluruh parpol telah diverifikasi dan melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dan persyaratan verifikasi. Pada tahun 2019 proses bantuan keuangan bagi Partai Politik dilaksanakan bagi parpol hasil Pemilu Legislatif periode tahun 2019-2024 terdapat 10 (sepuluh) Parpol.

Secara keseluruhan untuk parpol berdasarkan hasil evaluasi dilihat bahwa masih ada bendahara parpol yang tidak cermat dalam pertanggungjawaban dana bantuan yang dikelola, hal ini dapat dilihat dari adanya temuan BPK terkait laporan pertanggungjawaban masing-masing parpol, selain itu Badan Kesbangpol akan terus memberikan penyuluhan dan



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

pendampingan terhadap parpol tentang mekanisme dan persyaratan administrasi kegiatan agar bisa tertib.

DATA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PERIODE 2019-2024

NILAI PER SUARA = RP. 3.800,-

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5 Kursi	34.286 Suara	130.286.800	Lengkap
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7 Kursi	46.667 Suara	177.334.600	Lengkap
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7 Kursi	45.361 Suara	172.371.800	Lengkap
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	13 Kursi	95.345 Suara	362.311.000	Lengkap
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2 Kursi	20.373 Suara	77.417.400	Lengkap
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3 Kursi	23.250 Suara	88.350.000	Lengkap
7.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1 Kursi	14.340 Suara	54.492.000	Lengkap
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1 Kursi	16.764 Suara	63.703.200	Lengkap
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5 Kursi	34.071 Suara	129.469.800	Lengkap
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1 Kursi	12.410 Suara	47.158.000	Tidak Lengkap
JUMLAH		45 Kursi	342.867 Suara	1.302.894.600	

Dari 16 Partai Politik pada 2019 menjadi 10 partai politik sesuai hasil Pemilu Legislatif tahun 2019, ada 9 Partai Politik yang telah melengkapi persyaratan sebagai penerima bantuan keuangan tahun 2021.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada indikator ini telah ditetapkan target 100% dan telah tercapai 97,50%, meskipun telah lengkap hal ini perlu terus diawasi lagi dalam penggunaan agar tidak terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan kegiatan dan anggaran yang didapat oleh Parpol. Agar parpol dan ormas bisa tertib dalam administrasi, maka Badan Kesbangpol akan melaksanakan Bimtek bagi Bendahara Parpol dan Ormas pada tahun berikutnya.

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021
Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	85 Nilai	77,83	91,56%
Jumlah konflik dan gejolak	30 kejadian	31 kali	96,67%
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	72 %	92,90%	92,90%
Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	100 %	57,00%	79,17%

ANALISIS CAPAIAN MENURUT IKU KABUPATEN :

Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021, ada 2 (dua) Indikator Pembangunan yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

1. Jumlah Konflik/Gejolak.
2. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Berdasarkan indikator tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Indikator Jumlah Konflik/Gejolak,**

Berdasarkan data dari Bidang Idiologi dan Wasbang jumlah kasus dan konflik sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1 kejadian, dan ditahun 2021 sebanyak 1 kejadian maka dapat dikatakan masih harus diupayakan dalam deteksi dini kejadian konflik dari tahun sebelumnya.

- ### 2. **Indikator Prosentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu,** di tahun 2020 pada Pemilihan Umum Serentak Kepala Daerah, dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sebesar 57,00 %, dimana hasil ini belum memenuhi target yang ada dengan realisasi hanya pada angka 80,28 % dari target yang ditetapkan sebesar 71%. Untuk itu dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat perlu upaya-upaya yang di lakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong meningkatkan partisipasi pilitik masyakat pada tahun yang akan datang.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KNERJA PROGRAM (OUTPUT)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022		PERKRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2022				
							TARGET RENJA PD TAHUN 2021		REALISASI RENJA PD TAHUN 2021		TINGKAT REALISASI				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA		
			K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
E.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
E.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90	Nilai	77,83	Nilai	85	Nilai	77,83	Nilai	91,50	persen	85	Nilai	77,83	Nilai	85,48	persen	
E.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	dokumen	0	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100	persen	6	dokumen	12	dokumen	40	persen	
E.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dokumen	0	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	persen	3	dokumen	6	dokumen	40	persen	
E.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	dokumen	0	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	persen	3	dokumen	6	dokumen	40	persen	
E.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	150	laporan	0	laporan	20	laporan	20	laporan	100	persen	20	laporan	40	laporan	40	persen	
E.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	900	orang/bulan	0	orang/bulan	900	orang/bulan	900	orang/bulan	100	persen	900	orang/bulan	900	orang/bulan	100	persen	
E.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	0	laporan	1	laporan	1	laporan	100	persen	1	laporan	2	laporan	40	persen	
E.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	laporan	0	laporan	18	laporan	18	laporan	100	persen	18	laporan	36	laporan	40	persen	
E.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Berekam Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	15	dokumen	0	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	persen	3	dokumen	6	dokumen	40	persen	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN FEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KNERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT))	TARGET KNERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026		REALISASI TARGET KNERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2022			
							TARGET RENJA PD TAHUN 2021		REALISASI RENJA PD TAHUN 2021		TINGKAT REALISASI				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	15	laporan	0	laporan	3	laporan	3	laporan	100	persen	3	laporan	3	laporan	40	persen
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	20	dokumen	0	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	0	persen	4	dokumen	4	dokumen	20	persen
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	375	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	persen	75	orang	75	orang	20	persen
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30	layanan	0	layanan	5	layanan	5	layanan	100	persen	8	layanan	11	layanan	36,67	persen
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20	jenis	0	jenis	4	jenis	4	jenis	100	persen	4	jenis	4	jenis	40	persen
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	145	jenis	0	jenis	29	jenis	29	jenis	100	persen	25	jenis	58	jenis	40	persen
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	152	jenis	0	jenis	19	jenis	19	jenis	100	persen	10	jenis	38	jenis	25,00	persen
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	21	cetakan	0	cetakan	3	cetakan	3	cetakan	100	persen	8	cetakan	11	cetakan	52,38	persen
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	1175	Orang/Kali	0	Orang/Kali	190	Orang/Kali	138	Orang/Kali	72,63	persen	250	Orang/Kali	388	Orang/Kali	33,02	persen
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (SPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	11940	berkas	0	berkas	0	berkas	0	berkas	0	persen	2220	berkas	2220	berkas	18,59	persen
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah	37	unit	0	unit	93	unit	93	unit	100	persen	48	unit	141	unit	381,0811	persen

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021-2025		REALISASI TARGET KINERJA HASIL, PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s.d TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s.d TAHUN 2022			
			2021	2025	2020	2020	TARGET RENJA PD TAHUN 2021	REALISASI RENJA PD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI	2022	2022	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s.d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	10 = 5+7+9	11 = 10&x100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa Perancang Urusan	12	bulan	0	bulan	12	bulan	12	bulan	100	persen	12	bulan	12	bulan	100	persen
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12	bulan	0	bulan	0	bulan	0	bulan	0	persen	12	bulan	12	bulan	100	persen
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	0	bulan	12	bulan	12	bulan	100	persen	12	bulan	12	bulan	100	persen
8.01.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Penyediaan jasa tesaga pendukung non PNS	12	bulan	0	bulan	12	bulan	12	bulan	100	persen	12	bulan	12	bulan	100	persen
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah perancang urusan pemerintahan daerah	100	persen	0	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	30	unit	0	unit	30	unit	28	unit	93,33	persen	30	unit	30	unit	100	persen
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	40	unit	0	unit	40	unit	21	unit	52,5	persen	40	unit	40	unit	100	persen
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	43	unit	0	unit	43	unit	25	unit	58,1395	persen	43	unit	43	unit	100	persen
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit gedung	0	unit gedung	2	unit gedung	2	unit gedung	100	persen	2	unit gedung	2	unit gedung	100	persen
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,36	Persen	0	Persen	1,41	Persen	1,41	Persen	100	persen	1,59	Persen	1,59	Persen	67,81	persen

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2022			
							TARGET RENJA PD TAHUN 2021		REALISASI RENJA PD TAHUN 2021		TINGKAT REALISASI				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	60	dokumen/bulan	0	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/bulan	24	dokumen/bulan	60	persen
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan	2550	orang	0	orang	650	orang	650	orang	94,20	persen	500	orang	1150	orang	45,10	persen
8.01.02.2.01.04	Polaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan	2000	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	persen	400	orang	400	orang	20	persen
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,75	Persen	0	Persen	11,04	Persen	11,04	Persen	100	persen	11,36	Persen	11,36	Persen	77,02	persen
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kemandirian Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Khusus Daerah, serta Pemertanian Sistem Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	60	dokumen/bulan	0	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/bulan	24	dokumen/bulan	60	persen

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s.d TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022		PERGRAJAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s.d TAHUN 2022			
							TARGET RENJA PD TAHUN 2021		REALISASI RENJA PD TAHUN 2021		TINGKAT REALISASI				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s.d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7x100		9		10 = 8+7+0		11 = 10x100	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan	7000	orang	0	orang	150	orang	150	orang	100	persen	1350	orang	1500	orang	21,37	persen
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol yang difasilitasi terkait pembinaan, verifikasi, penyusunan dan minex baskas parpol	16	parpol	0	parpol	15	parpol	15	parpol	93,75	persen	16	parpol	15	parpol	93,75	persen
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik daerah	270	Laporan	0	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	100	persen	24	Laporan	60	Laporan	22,22	persen
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang terlibat administrasi	14,6	Persen	0	Persen	7,3	Persen	7,3	Persen	100	persen	8,3	Persen	8,9	Persen	61,81	persen
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknik Dan Pementapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	130	dokumen	0	dokumen	20	dokumen	17	dokumen	85,00	persen	20	dokumen	37	dokumen	28,46	persen

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021-2025		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021						PERFORMAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2022					
							TARGET RENJA PD TAHUN 2021		REALISASI RENJA PD TAHUN 2021		TINGKAT REALISASI		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pembendayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Konflik Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang difasilitasi	145	ormas	0	ormas	30	ormas	17	ormas	56,67	persen	30	ormas	47	ormas	32,41	persen
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekosektoral	1,58	Persen	0	Persen	0,96	Persen	0,90	Persen	100	persen	1,09	Persen	1,09	Persen	68,90	persen
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemasokan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	20	dokumen/tri wulan	0	dokumen/tri wulan	5	dokumen/tri wulan	5	dokumen/tri wulan	100	persen	5	dokumen/tri wulan	20	dokumen/tri wulan	40	persen
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan	3000	orang	0	orang	1000	orang	845	orang	84,5	persen	1000	orang	1845	orang	61,50	persen
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pemantauan ketahanan ekosektoral	58	laporan	0	laporan	18	laporan	18	laporan	100	persen	22	laporan	40	laporan	40,82	persen
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	Persen	0	Persen	100	Persen	100	Persen	100	persen	100	Persen	100	Persen	100	persen

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021						PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2022			
			4	5	6	7	8 = 7x100	9	10 = 9x100	11 = 10x100	12 = 11x100					
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemertapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	60	0	12	12	100	12	100	100	persen	12	24	40	100	persen
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kewaspadaan diri dan penanganan konflik	1550	0	300	300	100	300	100	persen	300	600	38,71	persen		
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitas forkopinda	250	0	22	14	63,64	50	64	25,60	persen					



Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Demi terwujudnya outcome yang dimaksud, Pada tahun 2021 Total Anggaran belanja Badan Kebangpol Rp. 15.160.410.154,00 yang meliputi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (APBD-P). Dengan realisasi atau serapan tahun ini adalah Rp. 12.773.100.169,00 (84,25%) pada tahun ini mengalami penurunan penyerapan anggaran dari tahun 2019 sebesar 5,01%. Dimana pada tahun 2020 penyerapan anggaran sebesar 89,26% (termasuk belanja gaji dan tunjangan) Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan rincian per kegiatan sebagai berikut :

Data Pengelolaan Keuangan OPD Tahun 2021

No	Fokus	Jenis Data	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
1.	Alokasi Anggaran SKPD	Total Anggaran SKPD (Belanja Operasi)	15.160.410.154,00	12.773.100.169,00	2.387.309.985,00	84,25
2.	Kesbangpol	Besaran Belanja Pegawai	8.950.679.770,00	7.332.457.330,00	1.618.222.440,00	81,92
3.		Besaran Belanja Barang dan Jasa	4.726.073.784,00	4.004.527.139,00	721.546.645,00	84,73
4.		Besaran Belanja Hibah	1.302.894.600,00	1.255.736.600,00	47.158.000,00	96,38
5.		Besaran Belanja Modal	180.762.000,00	180.379.100,00	382.900,00	99,79



PENGUKURAN KINERJA DAN KEUANGAN SASARAN STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

Sasaran Strategis I :				Program :		
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	95,89%	95,89	10.282.105.554	8.542.933.812	83,09
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	88%	88%	100			
Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan BMD	100%	100%	100			
Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	100%	100%	100			
Tingkat Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100%	100%	100			
Sasaran Strategis II :				Program :		
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat				Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
Cakupan Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat	100%	100%	100	1.096.130.000	809.173.060	73,82
Sasaran Strategis III :				Program :		
Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila				Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan	100%	94,20%	94,20	750.000.000	660.028.000	88,00
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud	100%	92,25%	92,25	1.151.300.000	986.741.697	85,71
Sasaran Strategis IV :				Program :		
Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat				Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik	100%	100%	100	1.690.874.600	1.610.578.600	95,25
Persentase Parpol Yang Tertib Administrasi	100%	93,75%	93,75			
Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	100%	56,67%	56,67	190.000.000	163.645.000	86,13



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Periode pembangunan tahun 2016 s/d 2021, penyelenggaraan pembangunan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, data yang dapat disajikan adalah data kinerja layanan yang secara rinci telah dikemukakan diatas dan data LPPD Kutai Kartanegara 2021. Badan Kesbangpol telah melakukan upaya-upaya konkrit berupa pembinaan politik di daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain. Pembinaan dilakukan pada tahun 2021, pembinaan politik di daerah pada tahun 2021 yaitu sebanyak 13 kegiatan, hal ini dilakukan dalam rangka pendidikan politik pada tahun 2021, kegiatan ini diharapkan akan membawa hasil yakni peningkatan partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan untuk tahun 2022 hingga 2024 capaian diharapkan bisa bertahan atau bahkan meningkat walaupun sesuai Permendagri 18 tahun 2020 Badan Kesbangpol tidak terdapat IKK sebagaimana biasanya, namun Badan Kesbangpol tetap akan melakukan pengukuran sesuai dengan indikator yang ada sedangkan untuk pembinaan ormas juga meningkat walaupun terdapat regulasi yang membatasi dan untuk 2022 dan 2023 diharapkan akan sesuai dengan target pada renstra dengan didukung pendanaan yang memadai. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan OPD Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berkenaan. Selengkapnya dapat disampaikan pada tabel berikut :

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	2021	TAHUN 2022 (Triwulan I)	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:													
Indikator Tujuan:													
1	Persentase permasalahan (poleksosbudhankam yang ditindaklanjuti)			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):													
1	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejala			Kejadian	30	28	25	24	31	9	25	24	
2	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas			Persen	2,37	2,68	3,99	3,33	2,37	2,38	2,99	3,33	
3	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi			Persen	4,28	4,4	4,5	5,53	4,28	4,30	4,5	5,53	
II INDIKATOR PROGRAM:													
1	Nilai SAOP Perangkat Daerah			Nilai	85	86	87	88	n/a	n/a	87	88	
2	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah			Persen	-	11,36	11,62	14,27	-	11,09	11,62	14,27	
4	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan			Persen	100	1,59	1,78	1,99	94	1,42	1,78	1,99	
5	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud			Persen	100	1,09	1,21	1,33	93	1,01	1,21	1,33	
6	Persentase ormas yang tertib-administrasi			Persen	100	8,9	9,9	11,4	57	8,0	9,9	11,4	
III INDIKATOR KEGIATAN:													

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	2021	TAHUN 2022 (Triwulan I)	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	2	12	12	
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	2	12	12	
3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	2	12	12	
4	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya			Dokumen/Triwulan	5	5	5	5	5	1	5	5	
5	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Dokumen	30	20	20	30	17	3	20	30	


 Kepala Badan Kesbangpol
 Kabupaten Kota Kartanegara,
RINPA DESIANTI, S.Sos., M.Si
 NIP. 19691226 200112 2 002



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol	1. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran belum memadai 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 3. Masih lemahnya tingkat disiplin aparatur 4. Kurangnya kompetensi SDM Aparatur 5. Kurangnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan kinerja, keuangan dan aset 6. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan kinerja
2	Situasi keamanan daerah yang belum stabil	Masih munculnya konflik dan gejala di masyarakat	1. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

			3. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah
3		Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ormas	<ol style="list-style-type: none">1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan5. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat7. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku8. Masih terdapat ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah
4		Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat dalam bidang politik2. Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang kehidupan demokrasi3. Masih terdapat parpol yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas, akan kami sampaikan juga data pendukung terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan

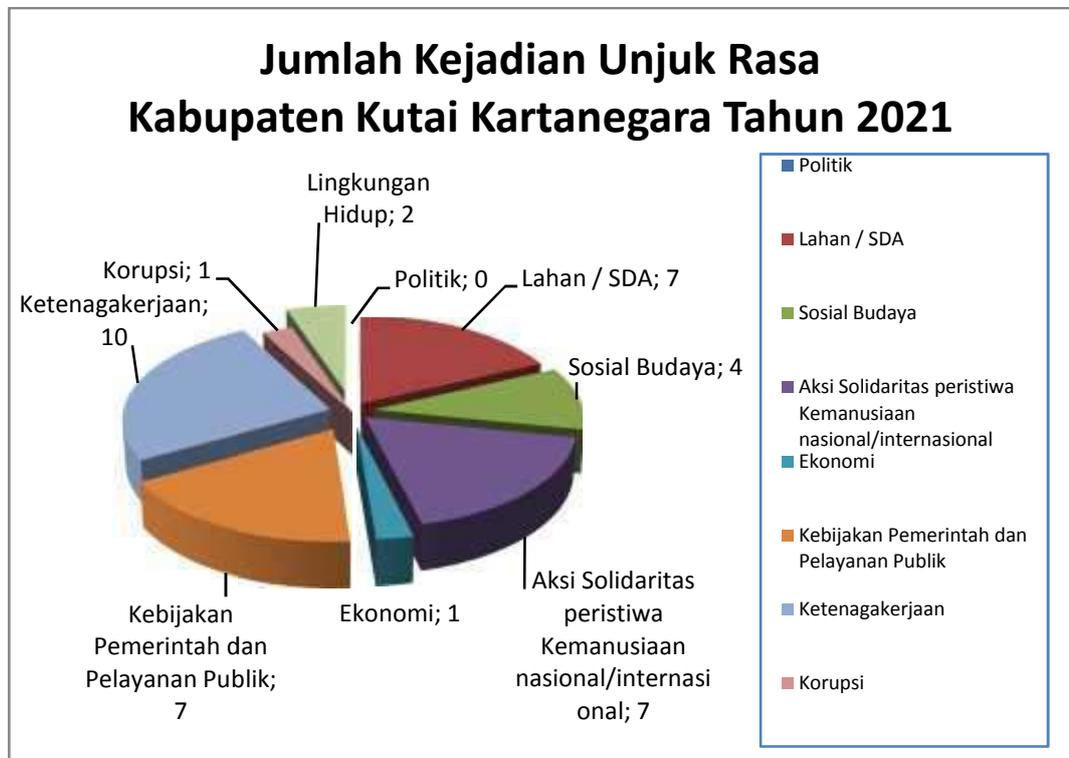
Kesbangpol

- a. Pelayanan administrasi perkantoran memang telah sepenuhnya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang belum bisa dilaksanakan sejak 2016, sehingga hanya yang bersifat prioritas yang tetap dilaksanakan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari Pengurus Barang hanya terdapat 83 % sarana dan prasarana dalam kondisi baik yang dapat digunakan, sehingga perlu penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- c. Masih kurangnya kompetensi SDM aparatur, hal ini karena sejak tahun 2016 belum ada pendidikan dan pelatihan baik teknis dan fungsional yang memadai bagi aparatur Badan Kesbangpol
- d. Predikat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol masih perlu ditingkatkan berdasarkan data sebagai berikut :

Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol				
2016	2017	2018	2019	2020
B	B	B	BB	BB



2. Masih tingginya angka konflik dan gejolak di masyarakat



3. Data kasus penyakit masyarakat

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2019 – 2021

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021
1	Narkoba	219	28	224
2	Pembunuhan	3	3	3
3	Kejahatan Seksual	24	12	1
4	Penganiayaan	13	8	22
5	Pencurian	33	41	17
6	Eksplotasi Anak Bawah Umur	22	15	24
7	Premanisme	4	8	0
	JUMLAH	318	115	291



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

4. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat

a. Data Ormas Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar tahun 2016 – 2021

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	ORMAS	-	2	3	4	12	10
2.	OKP	3	-	-	-	-	-
3.	LSM	-	2	-	2	-	2
4.	PAGUYUBAN	3	-	2	3	-	-
5.	AGAMA	1	-	-	1	2	1
6.	PROFESI	10	3	2	-	-	-
7.	LEMBAGA ADAT	2	2	1	-	-	-
8.	YAYASAN	-	-	-	2	2	4
JUMLAH		19	9	8	12	16	17

b. Data Partisipasi Pemilih Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada

Tahun 2015-2020

INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup : 93%	Pilkades : 70,06%	Pilgub : 60,44	Pileg/Pilpre 81,24	Pilbup 57,00

MASALAH DAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

NO.	MASALAH PRDK	MASALAH	AKAR MASALAH	ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	2	3	4	5	6	
1		Masih maraknya konflik dan gejolak di masyarakat	Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat	Pemerintah memfasilitasi seluruh stake holders terkait dalam suatu Forum/Tim dalam penyelesaian berbagai konflik dan gejolak yang timbul serta perlunya upaya monitoring dan pengujian analisis yang akurat terhadap dampak yang akan timbul dan potensi kerawanan yang mempengaruhi situasi kondusifitas daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
2			Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
3			Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
6	kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ormas	Situasi kondusifitas daerah yang belum stabil	Miskomunya berbagai isu etnis kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi	Pemerintah melaksanakan program pendidikan wawasan kebangsaan dan melakukan sosialisasi dan melaksanakan TsT bagi para pegawai tentang wawasan kebangsaan dan pancasila serta sosialisasi dan penyuluhan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemertapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
7			Semakin meningkatnya kasus perselisihan masyarakat	Pemerintah melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan kegiatan yang positif bagi para pemuda khususnya dan kepala masyarakat luas pada umumnya		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
8			Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat	Pemerintah melakukan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat yang ada terhadap segala aspek ormas tersebut		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
9			Beragannya suku yang memunculkan ego kesukuan			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENSEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemertapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
			Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kemukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kemukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
		Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku		PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENSAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemertapan Pelaksanaan Pemerdayaan dan Penguasaan Organisasi Kemasyarakatan		
		Masih terdapat ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemerdayaan Ormas, Evaluasi dan Monev Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		

NO.	BASALAH POYOK	BASALAH	AKAR BASALAH	ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	2	3	4	5	6
10		Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat	Kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat dalam bidang politik	Pemerintah melakukan upaya pendidikan politik bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemertapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
11			Kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang kehidupan demokrasi	Melakukan upaya monitoring terhadap perkembangan kehidupan politik di Kab. Kutar		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
12			Masih terdapat parpol yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah	Pemerintah memfasilitasi dan memberikan pelatihan bagi masyarakat dan pengurus partai politik		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah



 Kepala Badan Kelembagaan
 Kabupaten Kutai Kartanegara,
RENDA DESMANTI, S.Pd., M.Si
 NIP. 19691226 200112 2 002



Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menepisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.

1) Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkhisme.

2) Politisasi Nilai-Nilai Agama

Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama beberapa tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaannya di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.



3) Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum

Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (*civil society*) yang tangguh.

4) Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif.



5) Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”. Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

6) Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).



Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan :

1) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau *early warning system* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh *stakeholders* bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia.

2) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan



Masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara Negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3) Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para *stakeholder* (Partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam



memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat

5) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

6) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol

Dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol yang handal dan profesional.

7) Peningkatan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.



8) Sarana dan Prasarana

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Bupati dan Wakil Bupati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- A. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan masyarakat tentang rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum
- B. Adanya Aspirasi atau harapan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan memicu terjadinya konflik dan gejolak di masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas daerah.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

- C. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan ekses dekadensi moral yang bisa mengarah pada perubahan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- D. Munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara
- E. Penciptaan iklim demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan akhir RKPD tahun 2023 telah ditetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah 2023 dimana Badan Kesbangpol termasuk pada prioritas pertama yaitu “Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah”. Dalam rancangan ini perangkat daerah harus menjabarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan sasaran dan indikator dalam RPJMD yang akan diselaraskan dengan RENSTRA dan diturunkan dalam perencanaan tahunan dalam RENJA OPD, adapun prioritas pembangunan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol di dalam rancangan RKPD 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Prioritas 1 Tata Kelola Pemerintahan

SASARAN DAERAH	INDIKATOR DAERAH	STRATEGI DAERAH	KEBIJAKAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2023
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Penataan dan Pengembangan Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	11,62%
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,78%



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,21%
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang tertib administrasi	9,9%

Rancangan Akhir RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026 telah memuat program beserta pagu indikatif OPD dan setelah dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan pada Badan Kesbangpol pada tahun 2023 yang dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan kegiatan prioritas terutama untuk mendukung kelancaran dan situasi kondusif menjelang tahapan Pemilu serentak Tahun 2024 dan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat.

Dari penjabaran rancangan RKPD tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan OPD tersebut dijabarkan lagi menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan pagu indikatif dimana terdapat perbedaan terkait perubahan kegiatan dan besaran pagu indikatif antara Rancangan yang disebabkan oleh acuan ketersediaan pagu indikatif dan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu (KPU dan BAWASLU) dalam rangka



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

tahapan Pemilukada Serentak Tahun 2024 yang dimulai pada tahun 2023, maka hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan bagian tentang program dan kegiatan.

Proses ini sangat diperlukan untuk mendeteksi dini perencanaan yang baik dimulai dari RPJMD, RKPD, Renstra OPD hingga Renja OPD. Selengkapnya review terhadap rancangan RKPD tahun 2023 dapat disampaikan pada tabel berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini, Badan Kesbangpol tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang masuk dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD, hal ini disebabkan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol untuk pembentukan karakter masyarakat dan pencegahan konflik serta peningkatan partisipasi politik masyarakat dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Usulan Program dan Kegiatan

dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	RANCANGAN RKPD/RENTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87	18.059.678.285,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87	18.043.422.283,00	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	120.000.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	120.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	40.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	40.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	80.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	80.000.000,00	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan kepmimtagri (50-585) tahun 2023, dimana sebelumnya satuannya dokumen berubah menjadi laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 laporan	8.652.932.208,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 laporan	9.896.656.206,00	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 orang/bulan	8.517.272.208,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 orang/bulan	8.901.016.206,00	terdapat penambahan pagu gaji dan tunjangan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	20.000.000,00	

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	115.640.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	115.640.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 dokumen	40.800.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 dokumen	40.800.000,00	
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	OPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	40.800.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	40.800.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	20.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	20.000.000,00	
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	20.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	20.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 layanan	437.733.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 layanan	437.733.300,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3.750.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3.750.000,00	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Eupmendagri 050-588 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya jenis berubah menjadi paket.

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KNERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KNERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	27.296.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	27.296.000,00	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya jerik berubah menjadi paket
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 paket	13.344.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 paket	13.344.000,00	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya jerik berubah menjadi paket
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	18.120.300,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	18.120.300,00	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya jerik berubah menjadi paket

NO	RANCANGAN RKP/RENTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	345.243.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	345.243.000,00	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kipmendagri 050-5885 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya orang/kali berubah menjadi laporan
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2220 dokumen	30.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2220 dokumen	30.000.000,00	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kipmendagri 050-5885 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya bukan berubah menjadi dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	47.952.800,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	47.952.000,00	
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	47.952.800,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	47.952.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	508.382.777,00	Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	508.382.777,00	

NO	RANCANGAN RKPD/RENTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	RAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000,00	terdapat perbedaan pada satuan di restra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri OSO-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya/bulan berubah menjadi laporan
16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	126.599.369,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	126.599.369,00	terdapat perbedaan pada satuan di restra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri OSO-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya/bulan berubah menjadi laporan
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	380.783.408,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	380.783.408,00	terdapat perbedaan pada satuan di restra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri OSO-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya/bulan berubah menjadi laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pesongjeng Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pesongjeng urusan pemerintahan daerah	100%	231.878.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pesongjeng Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pesongjeng urusan pemerintahan daerah	100%	431.878.000,00	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	50.000.000,00	

NO	RANCANGAN R/PD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	40 unit	108.850.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	40 unit	108.850.000,00	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	23.050.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	23.050.000,00	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	49.978.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	349.578.000,00	tambahan 200.000.000,- (untuk keperluan rehab bangunan kantor BNN Kukar)
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,78%	700.000.000,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,78%	700.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pematangan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen	780.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan pematangan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen	780.000.000,00	
21	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 orang	400.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 orang	400.000.000,00	Facilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

NO	RANCANGAN RKPD/RENTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PASU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti/Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 orang	300.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 kecamatan (lokus, sungsung, ma Jawa, ma. Badak, kota bangun, ma. Wb, sehu/dan kesohan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 orang	300.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	31,62%	2.093.494.600,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	31,62%	7.288.747.600,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kabupaten Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Regula Daerah, serta Pementasan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemilihan Politik Dalam Negeri	12 dokumen	2.093.494.600,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kabupaten Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Regula Daerah, serta Pementasan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemilihan Politik Dalam Negeri	12 dokumen	7.288.747.600,00	

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 orang	400.800.000,00	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.000 orang	5.885.853.000,00	terdapat tambahan untuk Fasilitas kegiatan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten untuk menunjang pemilu pada 2024
24	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48 orang	1.402.894.800,00	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 orang	1.402.894.800,00	dimana sebelumnya menggunakan target perpol dan pada saat ini diubah menjadi satuan orang sehingga dari target 10 perpol yang difasilitasi diambil pengurus inti sebanyak 3 orang yang menjadi target capaian kerja

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU BUDJET (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48 laporan	200.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48 laporan	200.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase ormas yang tertib administrasi	9,9%	100.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase ormas yang tertib administrasi	9,9%	100.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemertapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	20 dokumen	100.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemertapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	20 dokumen	100.000.000,00	
26	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 orang	100.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 orang	100.000.000,00	dimana sebelumnya menggunakan target ormas dan pada saat ini diubah menjadi satuan orang sehingga dari target 25 ormas yang difasilitasi diambil pengurus inti sebanyak 3 orang yang menjadi target capaian kinerja
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekonosbud	1,21%	930.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekonosbud	1,21%	930.000.000,00	

NO	RANCANGAN RKPD/RENTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemertapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5 dokumen	780.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemertapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5 dokumen	930.000.000,00	
27	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 orang	505.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 orang	705.000.000,00	Penambahan 200.000.000,- untuk keperluan tarjutan pembekalan desa bersinar (bensin narkotika dan pembentukan sekolah bersinar (bensin narkotika), kewadian kegiatan ini terkait fasilitas kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
28	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	22 Laporan	225.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	22 Laporan	225.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	1.800.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	1.800.000.000,00	

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU BUDGETIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 dokumen	1.800.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 dokumen	1.800.000.000,00	
29	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 orang	400.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 orang	400.000.000,00	terdapat perbedaan pada target dan satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya laporan dan berubah menjadi orang yang melakukan koordinasi deteksi dini dan pelaporan
30	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	50 dokumen	1.400.000.000,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	50 dokumen	1.400.000.000,00	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya laporan berubah menjadi dokumen
JUMLAH					15.393.372.885,00	JUMLAH				21.462.169.883,00	



Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,
RITA DESIANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 19691226 200112 2 002



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan



hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

RKP 2023 mengusung tema “**Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”

Dari visi dan agenda pembangunan tersebut, dalam visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kesesuaian yang merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun agenda pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi RPJMN tahun 2020 – 2024 tersebut adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dari agenda pembangunan tersebut yang sesuai dengan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di misi ke 4 dan 7.



Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenang an OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri	Masih kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Persentase aparat dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta tingginya ego kesukuan Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara

Yang Sejahtera dan Berbahagia”

Guna mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara perwujudan *Misi Kesatu* dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

“Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”

Dalam penjabaran misi tersebut Badan Kesbangpol telah menuangkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Tabel 3.1
TUJUAN OPD

MISI 1 RPJMD	TUJUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN
1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang diselesaikan

Tabel 3.2
SASARAN OPD

SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak.
	2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas



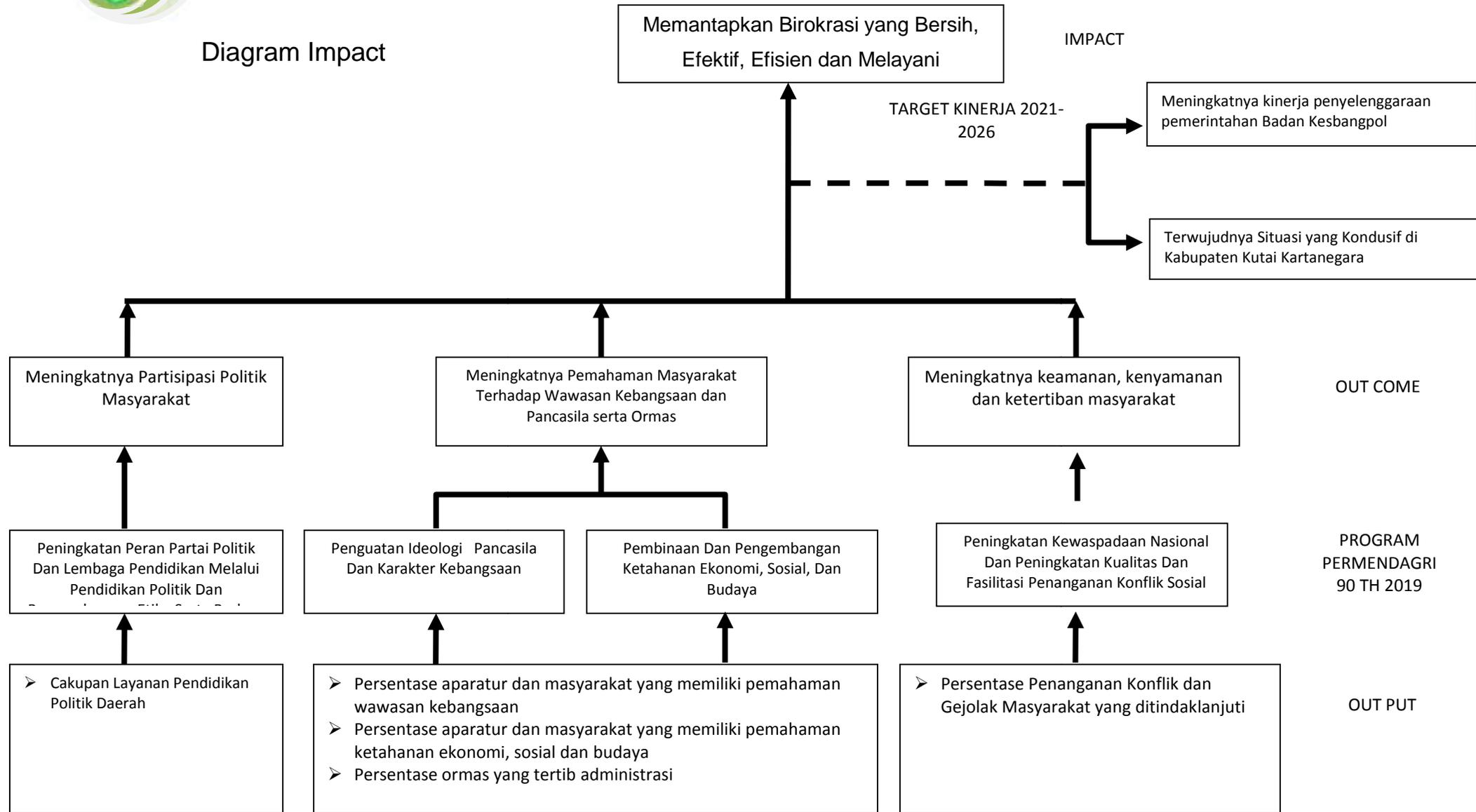
RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

	3. Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi
--	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Diagram Impact





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya.

Dalam rangka mengimplementasikan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan baik yang telah ditentukan dalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik badan sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode Renstra Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	Kesbangpol, Kepolisian dan TNI
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	1. Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Kesbangpol dan Kepolisian
3	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	1. Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	Kesbangpol dan KPU

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026 dan pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol sebagaimana yang telah termuat pada Renstra Badan Kesbangpol tahun 2021 – 2026, sehingga pada tahun anggaran 2023 dalam perumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kerjanya, disamping program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Renstra, sebagai berikut :



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

1. Tertangkapnya terduga jaringan teroris dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diperlukan upaya lebih dalam pencegahan dan penanganannya terutama dalam pencegahan munculnya paham radikalisme
2. Masih banyaknya masalah sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang maupun perkebunan, terutama lahan pada lokasi Ibu Kota Negara Baru
3. Pencegahan dan penanganan konflik dalam rangka pasca pelaksanaan menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dimana tahapan pelaksanaan dimulai pada tahun 2022
4. Terdapat kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat yang berdampak timbulnya gejolak di masyarakat
5. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA
6. Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang wawasan kebangsaan, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara
7. Masih tingginya angka penyakit masyarakat terutama peredaran dan penyalahgunaan Narkoba
8. Denga terbitnya peraturan baru terkait ormas dan partai politik, maka perlunya untuk memfasilitasi ormas dan parpol dalam permasalahan terkait hal tersebut
9. Masih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sehingga diperlukan upaya pendidikan politik yang lebih lagi pasca gelaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2020



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi terutama dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka diperlukan penyesuaian pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 dan Rencana kerja tahunan tahun 2023 dan target kegiatan tahun 2023 banyak mengalami perubahan baik dari jumlah program maupun jenis kegiatannya serta sub kegiatan. Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 1 program, 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan
2. Untuk kegiatan non generik terdiri dari 5 program, 5 kegiatan dan 10 sub kegiatan
3. Sehingga seluruhnya berjumlah 6 program, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan

Kemudian penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol tahun 2023 disesuaikan dengan Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 yang memuat program prioritas dan program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, dimana dalam hal tersebut Badan Kesbangpol termasuk sebagai OPD pendukung dalam 2 (dua) program dedikasi sebagai berikut :

1. Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)

Terkait dengan program tersebut Badan Kesbangpol sebagai OPD pendukung dari OPD utama yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Badan Kesbangpol



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

2. Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN)

Dalam program ini Badan Kesbangpol sebagai OPD pendukung dari OPD utama yaitu Sekretariat Kabupaten yang memiliki tugas untuk menginventarisir rumah-rumah ibadah di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini Badan Kesbangpol memberikan dukungan berupa pelaksanaan fasilitasi terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi terhadap pendirian rumah-rumah ibadah di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Dari hal tersebut Badan Kesbangpol telah terakomodir ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol untuk perencanaan tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

PROGRAM RENJA KESBANGPOL TAHUN 2023

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan di masyarakat	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang
	Peningkatan		



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

	pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam	Konflik Sosial	ditindaklanjuti
	Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing		
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri	Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah
	Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah		
	Penguatan kapasitas kelembagaan parpol		



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

	Peningkatan fasilitas pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu		
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Peningkatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat	1. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan
Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Peningkatan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	2. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud
	Peningkatan fasilitas pemerintah	3. Pemberdayaan dan Pengawasa	Persentase ormas yang tertib



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

	daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika	n Ormas	administrasi
	Penguatan kapasitas dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		

Dalam rancangan akhir ini terdapat penambahan pagu indikatif untuk keperluan memfasilitasi penyelenggaraan pemilu (KPU dan BAWASLU) dalam rangka tahapan Pemilukada Serentak Tahun 2024 yang dimulai pada tahun 2023. Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas
3. Adapun sub kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut :
 - a. Prioritas 1



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

b. Prioritas 2

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Adapun perincian kegiatan tahun 2023 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2024 adalah sebagai berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/WOTA	Nilai SAMIP Perangkat Daerah			87	10.643.422.283,00	APBD II		88	10.808.937.692,00
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		ASN Badan Kesbangpol	4 dokumen	120.000.000,00	APBD II		4 dokumen	130.000.000,00
1	8.01.01.2.01.01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong		3 dokumen	40.000.000,00	APBD II		3 dokumen	50.000.000,00
2	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong		3 laporan	80.000.000,00	APBD II	terdapat perbedaan pada satuan di revisi karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5899 tahun 2021, dimana sebelumnya dokumen berubah menjadi laporan	3 laporan	80.000.000,00
	8.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		ASN Badan Kesbangpol	20 laporan	9.838.656.206,00	APBD II		20 laporan	8.652.912.206,00
3	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong		900 orang/bulan	8.501.036.206,00	APBD II	terdapat penambahan pagu gaji dan tunjangan	900 orang/bulan	8.517.272.206,00
4	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong		1 laporan	20.000.000,00	APBD II		1 laporan	20.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong		18 laporan	115.640.000,00	APBD II		18 laporan	115.640.000,00
	8.01.01.2.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		ASN Badan Esbangpol	3 dokumen	40.800.000,00	APBD II		3 dokumen	40.800.000,00
6	8.01.01.2.02.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong		3 laporan	40.800.000,00	APBD II		3 laporan	40.800.000,00
	8.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		ASN Badan Esbangpol	4 dokumen	20.000.000,00	APBD II		4 dokumen	20.000.000,00
7	8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong		75 orang	20.000.000,00	APBD II		75 orang	20.000.000,00
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		ASN Badan Esbangpol	6 layanan	437.753.300,00	APBD II		6 layanan	437.283.000,00
8	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggarong		4 paket	3.750.000,00	APBD II	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya jenis berubah menjadi paket	4 paket	5.000.000,00
9	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong		29 paket	27.296.000,00	APBD II	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya jenis berubah menjadi paket	29 paket	50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	KELOMPOH SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong		19 paket	11.344.000,00	APBD II	terdapat perbedaan pada satuan di restra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya jenis berubah menjadi paket	19 paket	21.000.000,00
11	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong		3 paket	18.120.300,00	APBD II	terdapat perbedaan pada satuan di restra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya jenis berubah menjadi paket	3 paket	40.000.000,00
12	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan		250 laporan	345.243.000,00	APBD II	terdapat perbedaan pada satuan di restra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya yang/kali berubah menjadi laporan	250 laporan	300.243.000,00
13	8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong		2220 dokumen	50.000.000,00	APBD II	terdapat perbedaan pada satuan di restra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya berkas berubah menjadi dokumen	2220 dokumen	50.000.000,00
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		ASN Badan Kesbangpol	100%	47.952.000,00	APBD II		100%	70.000.000,00
14	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong		5 unit	47.952.000,00	APBD II		5 unit	70.000.000,00
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		ASN Badan Kesbangpol	12 bulan	508.382.777,00	APBD II		12 bulan	508.382.484,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT))	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
15	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong		12 laporan	1.000.000,00	APBD II	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya bulan berubah menjadi laporan	12 laporan	1.000.000,00
16	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong		12 laporan	126.599.369,00	APBD II	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya bulan berubah menjadi laporan	12 laporan	126.599.076,00
17	8.01.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	Tenaga Harian Lepas (THL) Badan Kesbangpol	12 laporan	380.783.408,00	APBD II	terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya bulan berubah menjadi laporan	12 laporan	380.783.408,00
	8.01.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		ASR Badan Kesbangpol	100%	451.878.000,00	APBD II		100%	416.000.000,00
18	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tenggarong		30 unit	50.000.000,00	APBD II		30 unit	50.000.000,00
19	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong		40 unit	108.850.000,00	APBD II		40 unit	206.000.000,00
20	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tenggarong		43 unit	21.050.000,00	APBD II		43 unit	50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Tenggarong		3 unit	245.918.000,00	APBD II	Tambahan 200.000.000,- (untuk keperluan rehab bangunan kantor BHK Kukar)	2 unit	80.000.000,00
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan			1,78%	700.000.000,00	APBD II		40%	900.000.000,00
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan penertapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Aparatur dan Masyarakat, Pelajar dan Tokoh Pemuda serta Forum Pembauran Kebangsaan, Tokoh Adat dan Paguyuban	12 dokumen	700.000.000,00	APBD II		12 dokumen	900.000.000,00
21	8.01.02.2.01.01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan		500 orang	400.000.000,00	APBD II	Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	550 orang	500.000.000,00
22	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 kecamatan (Ika kula, sanga sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangun, ma. Wis, seluku dan kenohan)		400 orang	300.000.000,00	APBD II		500 orang	400.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023					GATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah			13,62%	7.288.747.600,00	APBD II		14,27%	8.626.894.600,00
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri		Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Ormas dan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kukar	12 dokumen	7.288.747.600,00	APBD II		12 dokumen	8.626.894.600,00
23	8.01.03.2.01.03	Penetapan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20 kecamatan		5.000 orang	5.685.853.000,00	APBD II	terdapat tambahan untuk Fasilitas kegiatan kepada KPU dan Rawan Kukar utk menunjang pemirkada 2024	5.000 orang	1.724.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKORAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24	8.01.01.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartasegara	30 orang	1.402.894.600,00	APBD II	dimana sebelumnya menggunakan target parpol dan pada saat ini dirubah menjadi satuan orang sehingga dari target 30 parpol yang difasilitasi diambil pengurus inti sebanyak 3 orang yang menjadi target capaian kinerja	48 orang	1.402.894.600,00	
25	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	48 laporan	200.000.000,00	APBD II		150 laporan	500.000.000,00	
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi		9,9%	300.000.000,00	APBD II		80%	290.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	20 dokumen	300.000.000,00	APBD II		30 dokumen	290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan		75 orang	100.000.000,00	APSD II	dimana sebelumnya menggunakan target ormas dan pada saat ini dirubah menjadi satuan orang sehingga dari target 25 ormas yang difasilitasi diambil pengurus inti sebanyak 3 orang yang menjadi target capaian kinerja	90 orang	250.000.000,00
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekonoisbud			1,21%	930.000.000,00	APSD II		1,33%	630.000.000,00
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Aparatur Masyarakat Pelajar Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pelaku Ekonomi	5 dokumen	930.000.000,00	APSD II		5 dokumen	630.000.000,00
27	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan		900 orang	705.000.000,00	APSD II	tambahan 200.000.000,- (untuk keperluan lanjutan pembekalan desa bersinar (bersih narkoba dan pembentukan sekolah bersinar (bersih narkoba), kemitraan kegiatan ini terkait fasilitas kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	600 orang	500.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penytagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penytagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan		22 Laporan	225.000.000,00	APSD II		18 Laporan	110.000.000,00
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti			100%	1.800.000.000,00	APSD II		300%	2.000.000.000,00
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Agenitor Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah dan Forkopimda	22 dokumen	1.800.000.000,00	APSD II		22 dokumen	1.000.000.000,00
29	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan		300 orang	400.000.000,00	APSD II	terdapat perbedaan pada target dan satuan di antara karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuanya laporan dan berubah menjadi orang yang melakukan koordinasi debetko dini dan pelaporan.	350 orang	500.000.000,00

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	8.01.06.2.01.09	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan		50 dokumen	1.400.000.000,00	APBD II	terdapat perbedaan pada satuan di revisi karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dimana sebelumnya satuannya laporan berubah menjadi dokumen	50 dokumen	1.500.000.000,00
		JUMLAH					21.462.169.883,00				17.695.232.292,00



 Kepala Badan Kesbangpol
 Kabupaten Kutai Kartanegara,
RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
 NIP. 19691226 200112 2 002



BAB V

P E N U T U P

A. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Ada beberapa sasaran yang belum mengakomodir kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh untuk tahun 2023. Hal ini bukan berarti sasaran tersebut tidak menjadi perhatian namun lebih fokus pada prioritas kegiatan sebagaimana tertera di atas untuk tahun 2023, dalam rangka mensinergikan kegiatan sesuai dengan misi RPJMD 2021 – 2026 khususnya untuk tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Sehingga sasaran yang belum direalisasikan dalam kegiatan 2022 secara bertahap akan dilaksanakan pada tahun ke depan, sesuai dengan pagu dan posting anggaran yang tersedia.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 yang harus diperhatikan oleh para penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan, antara lain :

1. Seluruh penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, utamanya program dan kegiatan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Renja Tahun 2023 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi dan sinergitas.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

2. Setiap penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Renja Badan Kesbangpol tahun 2023 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja perangkat daerah.
3. Kepala Badan, melalui Sekretaris, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap bidang secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023
4. Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2023, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rancangan akhir ini terdapat penambahan pagu indikatif untuk keperluan memfasilitasi penyelenggaraan pemilu (KPU dan BAWASLU) dalam rangka tahapan Pemilukada Serentak Tahun 2024 yang dimulai pada tahun 2023. Meskipun demikian dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD, untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan generik, baik dalam penyesuaian target kinerja hingga penundaan kegiatan.
2. Melakukan penentuan kegiatan prioritas dengan memberikan peringkat terhadap kegiatan yang dianggap sangat prioritas
3. Adapun sub kegiatan yang dianggap sangat prioritas dapat diurut sebagai berikut :
 - a. Prioritas 1
 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

b. Prioritas 2

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang-bidang teknis. Penyempurnaan matrik Renja bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.



RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Langkah atau kegiatan utama penyusunan Renja OPD meliputi : 1) Merumuskan kegiatan, 2) Merumuskan indikator kegiatan, 3) menetapkan target setiap indikator kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Penilaian pencapaian target kinerja kegiatan akan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka monitoring dan evaluasi kegiatan akan dikembangkan berdasarkan indikator dan target kinerja.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini disampaikan, sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Tenggarong, Mei 2022

**Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,**



RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
NIP. 19691226200112 2 002